



**EVALUASI PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN  
EKONOMI RAKYAT LAMONGAN BERBASIS PEDESAAN DI  
DESA CANDISARI KECAMATAN SAMBENG**

**(Studi Deskriptif pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”)**

**SKRIPSI**

oleh

**Anikdatul Milla**

**140910201033**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**

## PERSEMBAHAN

Penulis dengan rasa syukur Alhamdulillah dan bangga menyelesaikan dan mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ketiga orang tua penulis yakni, bapak, abah, dan ibu yang sangat penulis sayangi. Orang tua saya yang telah bekerja keras dengan penuh kesabaran, membimbing, menasehati, mendoakan, memotivasi, dan menyayangi penulis mulai kecil hingga sampai saat ini.
2. Seluruh keluarga besarku yang tidak hentinya memberikan support baik materiil maupun motivasi, terimakasih telah memberikan doa dan semangat selama ini kepada penulis.
3. Adik-adikku, sesungguhnya semangat perjuanganku telah kuketahui bertransformasi dalam pikirmu.
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, yang dengan sabar mendidik dan memberikan banyak ilmu.
5. Almamaterku Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Terimakasih karena telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang tak ternilai serta menjadi sebuah kebanggan sampai kapan pun.

**MOTTO**

“Tidak ada Kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan.  
Tidak ada keberhasilan tanpa kerja kersa, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan”  
(Chairul Tanjung)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Penerbit Buku Kompas. 2012. *Chairul Tanjung Si Anak Singkong*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anikdatul Milla

NIM : 140910201033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Evaluasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan Di Desa Candisari Kecamatan Sambeng “(Studi Deskriptif Pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah dituliskan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 September 2018

Yang Menyatakan,

Anikdatul Milla

140910201033

**SKRIPSI**

**EVALUASI PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN  
EKONOMI RAKYAT LAMONGAN BERBASIS PEDESAAN DI  
DESA CANDISARI KECAMATAN SAMBENG**

**(Studi Deskriptif pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”)**

*EVALUATION OF MOVEMENT PROGRAM BUILDING PEOPLE'S ECONOMY  
FOR RURAL-BASED LAMONGAN IN CANDISARI VILLAGE, KECAMATAN  
SAMBENG*

*(Descriptive study of the "Godong Ijo Sejahtera" Horticultural Farmers Group)*

oleh

**Anikdatul Milla**

**140910201033**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdiyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Anwar, M.Si

## RINGKASAN

**Evaluasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan Di Desa Candisari Kecamatan Sambeng (Studi Deskriptif Pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”);** Anikdatul Milla; 140910201033; 2018; 89 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi Negara; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Program GEMERLAP telah dilaksanakan sejak tahun 2011 berdasarkan Perbup No 13 Tahun 2011 yang bertujuan untuk membangun ekonomi pedesaan guna menumbuhkan sentra ekonomi baru. Program GEMERLAP merupakan program daerah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus penanggulangan kemiskinan dengan ditandai berkembangnya sentra-sentra industri ekonomi peesaan sebagai wujud inovasi masyarakat pedesaan yang berkelanjutan. Ada berbagai lintas instansi atau SKPD yang terlibat dalam penyelenggaraan program tersebut. Salah satu kelompok usaha yang menerima bantuan hibah adalah Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” berupa pupuk sebesar Pupuk KCI 7000 kg, Pupuk Organik 9800 kg, Pupuk Organik Cair 168 lt, dan 14 Liter Pestisida. Program GEMERLAP pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” dilaksanakan dengan melibatkan tiga aktor sesuai dengan paradigma *New Public Service* yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah disini adalah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan, sedangkan swasta adalah CV Negeri Hijau Indonesia, dan Masyarakat yakni Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”.

Pada dasarnya setiap kebijakan harus dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui penyebab kegagalan dan output yang dicapai. Oleh karena itu, Program GEMERLAP pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” dievaluasi menggunakan kriteria William N Dunn yakni efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hal tersebut dikarenakan pada awalnya Pepaya Calina sempat menjadi sentra ekonomi baru di Kecamatan

Sambeng sebelum akhirnya tiba-tiba menghilang. Kondisi tersebut yang mendorong peneliti untuk mengetahui program GEMERLAP pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” di Desa Candisari Kecamatan Sambeng.

Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan evaluasi program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Berbasis Pedesaan di Desa Candisari Kecamatan Sambeng. Format penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik informan menggunakan teknik *Purposive*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada pelaksanaan program terdapat berbagai permasalahan yakni Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan yang tidak menjalankan program sesuai dengan Juklak GEMERLAP. Dinas tidak melaksanakan sosialisasi program pada kelompok sasaran. Selain itu, dinas juga tidak memberikan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan pada kelompok penerima bantuan hibah. Dinas hanya menyalurkan bantuan hibah pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”. Sebaliknya, CV Negeri Hijau yang melaksanakan pembinaan dan pendampingan pada kelompok tersebut dikarenakan membuat suatu kerja sama dengan kelompok tani. Ketidakefektifan dinas dalam melaksanakan program dikarenakan pepaya Calina tidak termasuk dalam Road-Map program Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelenggaraan program GEMERLAP pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” yang kurang optimal oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan berimplikasi pada ketidakefektifan program mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari enam kriteria Willian N Dunn, hanya dua kriteria yang terpenuhi yakni kriteria perataan dan ketepatan. Ketidakefektifan dinas tersebut dikarenakan pepaya Calina tidak termasuk dalam Road-Map program.

## PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan Di Desa Candisari Kecamatan Sambeng (Studi Deskriptif Pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Dr. Sutomo, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs, Boedijono, M.Si, Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan akademis yang telah diberikan selama ini;
5. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama atas bantuan pemikiran, motivasi, harapan yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
6. Drs. Anwar, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan pendidikan dan pembelajaran;
8. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis menghimpun data

terkait penelitian ini;

9. Teman-teman seperjuangan Veri Ikhwan Amir dan Fahmi Febri P. terima kasih atas semua kenangan dan perjuangan yang telah kita lalui bersama.
10. Ketiga kawanku yang seperti saudriku, terimakasih selalu mendukungku tanpa henti, kupersembahkan ini untuk kalian yakni Nia Mega Kurniasari, Siti Jahro, dan Novitasari Prasetyaningtyas. Serta manusia tersabarku Muhammad Rifki Efendi.
11. Teman-teman seperjuangan di Ilmu Administrasi Negara angkatan 2014 sebagai teman perjuangan di kehidupan perkuliahan, terima kasih atas kebersamaannya selama ini
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi selanjutnya. Akhirnya penulis berharap, semoga proposal ini dapat bermanfaat.

Jember, 1 September 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	.....	i
<b>HALAMAN MOTTO</b>	.....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	.....	iii
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b>	.....	iv
<b>RINGKASAN</b>	.....	v
<b>PRAKATA</b>	.....	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	.....	xii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	.....	1
1.1 Latar Belakang	.....	1
1.2 Rumusan Masalah	.....	9
1.3 Tujuan	.....	9
1.4 Manfaat	.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis	.....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	.....	11
2.1 Konsep Dasar	.....	11
2.1.1 <i>New Public Service</i>	.....	11
2.1.2 Kebijakan Publik	.....	13
2.1.3 Evaluasi	.....	16
2.1.4 Program Pemberdayaan	.....	24
2.1.5 GEMERLAP	.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu	.....	28
2.3 Kerangka Konseptual	.....	30
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	.....	31
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	.....	31
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	.....	32

3.3 Objek dan Subjek Penelitian	32
3.4 Fokus Penelitian	34
3.5 Informan Penelitian	34
3.6 Data dan Sumber Data	36
3.7 Metode Pengumpulan Data	38
3.8 Teknik Analisis Data	39
3.9 Teknik Menguji Keabsahan Data.	41
<b>BAB 4. PEMBAHASAN</b>	<b>43</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan	43
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Sambeng	47
4.1.3 Gambaran Umum Desa Candisari	49
4.2 Gambaran Program GEMERLAP di Kabupaten Lamongan.	52
4.3 Sejarah Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”	62
4.4 Program GEMERLAP pada kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”	64
4.5 Evaluasi Program GEMERLAP pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” di Desa Candisari	71
4.5.1 Evaluasi Program GEMERLAP Pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” Berdasarkan Teori William N. Dunn	73
<b>BAB 5. PENUTUP</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
2.1 Perbandingan Paradigma OPA, NPM, dan NPS	12
2.2 Perbedaan pendekatan evaluasi kebijakan publik	18
2.3 Tipe Evaluasi Kebijakan Publik Menurut Dunn	21
2.4 Empat Tipe Masalah dalam Kriteria Kecukupan	22
3.1 Data yang diperoleh	36
3.1 Data yang Dibutuhkan dan Cara Memperoleh Data	37
3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	41
4.1 Kualitas Angkatan Kerja di Desa Candisari	50
4.2 Daftar Hasil dan Luas Produksi Tanaman	52
4.3 Bantuan Hewan Ternak Program GEMERLAP	61
4.4 Daftar Nama Anggota	63
4.5 Hibah Pupuk untuk Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”	64
4.6 Data Pengajuan Pupuk	75
4.7 Evaluasi Program GEMERLAP pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”	80

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
1.1 Kontribusi pada PDRB .....	5
2.1 Tahapan kebijakan publik .....	16
3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman, 1992 .....	40
4.1 Peta Kabupaten Lamongan .....	43
4.2 Luas Lahan Menurut Jenisnya di Kabupaten Lamongan. ....	45
4.3 Peta Kecamatan Sambeng .....	47
4.4 Strukur Organisasi Kecamatan Sambeng .....	48
4.5 Alur Proses Pengajuan Bantuan Program, 2015 .....	60
4.6 Road-Map program Kerja Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan. ....	64

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Berbasis Pedesaan di Desa Candisari Kecamatan Sambeng. Mengingat salah satu dimensi dari administrasi negara adalah kebijakan publik maka penelitian ini berfokus pada kebijakan yang berbentuk program di Kabupaten Lamongan. Program tersebut dirancang untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat Lamongan dengan mengoptimalkan potensi di masing-masing desa. Namun, penelitian dilaksanakan pada kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” desa Candisari sebagai desa yang memiliki potensi pertanian.

Negara berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan nasional telah dilaksanakan diberbagai bidang salah satunya adalah bidang ekonomi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi;

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.\*\*\*\*)

Berdasarkan peraturan diatas maka pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tersebut untuk stabilitas ekonomi. Selain itu, cabang produksi yang penting dan strategis dikuasai dan dikelola oleh negara agar lebih optimal dan didistribusikan kepada masyarakat dengan prinsip keadilan. Kondisi demikian, agar terjadi pemerataan, meminimalisir konflik dan tidak dimonopoli.

Pemerintah menggunakan kebijakan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Kebijakan tersebut dapat berbentuk peraturan atau program yang disusun oleh pemerintah. Sebelum membuat suatu kebijakan, pemerintah memperhatikan isu atau masalah yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan isu yang tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar dan mengarah pada disintegrasi. Isu dibidang ekonomi merupakan isu yang berpotensi menimbulkan konflik terutama berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Chase dan Jones menjelaskan isu adalah masalah yang belum terpecahkan dan siap untuk diambil keputusannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah permasalahan yang dikedepankan untuk ditanggapi. Oleh karena itu, isu harus dimanajemen dan ditanggapi oleh pemerintah secara tepat. Manajemen isu yang salah akan berimplikasi memunculkan masalah yang lebih besar.

Isu atau masalah masuk dalam *agenda setting* pemerintah untuk diputuskan urgensi dibentuk suatu kebijakan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan kebijakan publik diputuskan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat. Kondisi demikian sesuai dengan teori Friedrich (2007) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Namun, tidak semua permasalahan tersebut dapat diatasi secara langsung. Kondisi demikian disebabkan pemerintah dihadapkan pada situasi keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi permasalahan untuk menentukan prioritas yang terlebih dahulu diselesaikan. Identifikasi masalah dapat mengetahui kedalaman dan urgensi suatu masalah sehingga pemerintah dapat menentukan skala prioritas permasalahan. Setelah itu, pemerintah menentukan suatu kebijakan publik yang tepat melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur suatu program atau kebijakan.

Kebijakan merupakan instrumen untuk mewujudkan pembangunan, salah satunya di bidang ekonomi. Ada berbagai kebijakan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, contohnya adalah paket kebijakan pembangunan ekonomi

jilid IV. Namun, kebijakan tersebut masih belum berhasil terbukti dari kinerja realisasi investasi, walaupun mengalami pertumbuhan tetapi masih di bawah target yang ditetapkan. Di antaranya realisasi investasi dunia ke Indonesia masih rendah (1,97%) dengan rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar US\$ 1.417,58 miliar. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa indikator dalam menentukan keberhasilan ekonomi yakni pendapatan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kemiskinan. Kemudian, pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan potensi dan urgensi permasalahan masing-masing daerah.

Pembangunan ekonomi di Lamongan difokuskan untuk mengatasi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan kesenjangan. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi Lamongan selalu meningkat namun tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita. Terbukti berdasarkan data Pemkab Lamongan bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 6,89% akan tetapi pendapatan perkapita masih berkisar Rp. 9.474.775 pada tahun 2010. Oleh karena itu, Pemkab Lamongan membuat suatu inovasi program untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni GEMERLAP (Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan). Pelaksanaan program didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP).

Tujuan program GEMERLAP adalah membangun ekonomi pedesaan dengan memberikan bantuan modal pada kelompok usaha sehingga dapat menjadi sentra ekonomi baru di pedesaan. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 1.342.266 jiwa yang persebaran penduduk lebih banyak di pedesaan. Selain itu, bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk. Kabupaten Lamongan menjadi salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Berdasarkan data BPS pada tahun 2015 tingkat kemiskinan Lamongan mencapai 178.470 jiwa. Melalui Program tersebut, Pemkab menargetkan tingkat kemiskinan berada di angka tidak lebih 12% pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2016 masih dikisaran angka 15,8%.

Seperti yang dikatakan oleh Bupati Lamongan dalam kompas.com (11/10/2016, diakses pada 16:02 WIB) bahwa,

“Program GEMERLAP adalah gawe (pekerjaan) bersama dari lintas instansi yang ada di lingkungan Pemkab Lamongan. Dengan harapan, pada akhir 2021 tingkat kemiskinan di Lamongan hanya berada di angka tak lebih dari 12 persen, (Kompas.com (11/10/2016))”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa program GEMERLAP merupakan kerjasama lintas SKPD di Lamongan yang disesuaikan dengan potensi desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 tahun 2011 tentang Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) pada pasal 7 ayat 1 da 2 yang berbunyi:

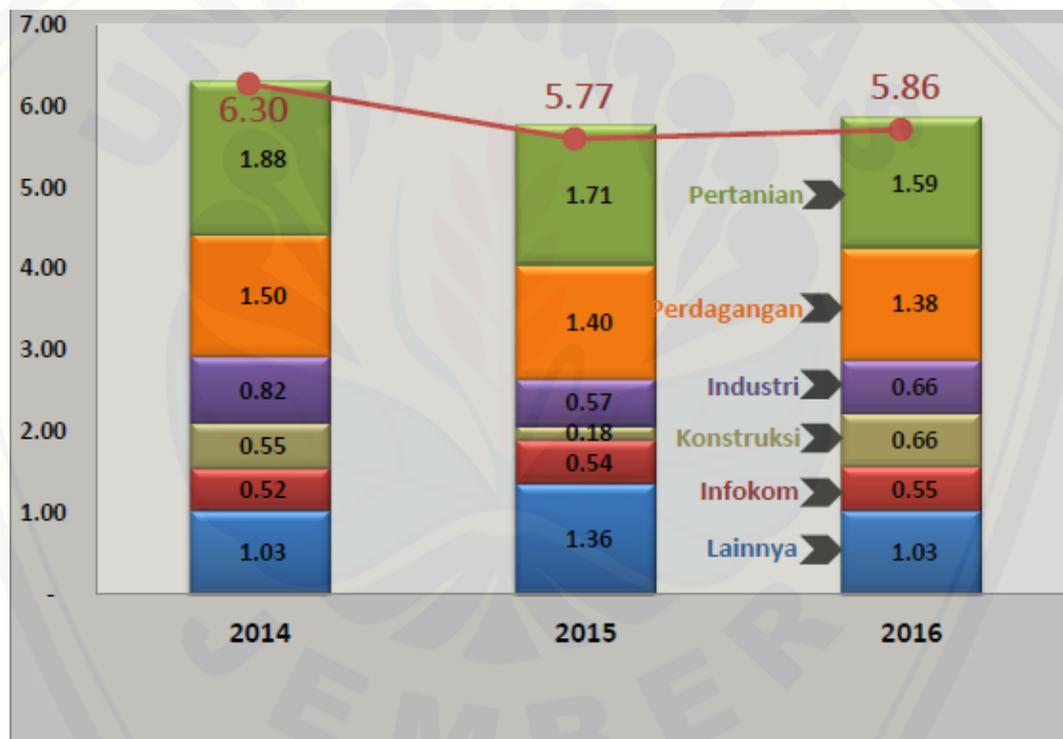
1. GEMERLAP dilaksanakan terbuka bagi semua kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan oleh multi SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan.
2. Gemerlap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari;
  - a. bidang pertanian
  - b. bidang peternakan
  - c. bidang perikanan
  - d. bidang koperasi, perdagangan, dan industri
  - e. bidang infrastruktur pedesaan.

Kondisi demikian, dapat memicu optimalisasi kinerja antar SKPD dan juga dapat menstimulus tumbuhnya berbagai jenis usaha pada masing-masing desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Misalkan desa Gumingrejo memiliki potensi pertanian maka SKPD yang terkait dengan bidang pertanian yakni Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan bertanggung jawab untuk optimalisasi potensi tersebut.

Program GEMERLAP didasarkan pada pemberian bantuan terhadap kelompok ekonomi desa. Bantuan tersebut dapat berbentuk permodalan dan pembinaan teknis secara intensif. Syarat utama usaha yang dapat diusulkan untuk memperoleh bantuan adalah yang dapat menjangkau dan mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat. Pada awalnya dilaksanakan sosialisasi yang terdiri atas dua tahap. Tahap pertama sosialisasi dilaksanakan di tingkat kabupaten yaitu di kantor bupati. Tahap kedua sosialisasi dilaksanakan ditingkat kecamatan yakni di

kantor setiap kecamatan. Kemudian, dilaksanakan seleksi pada beberapa kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok yang lolos pada tahap seleksi akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari SKPD-SKPD pelaksana program.

Penelitian ini terfokus pada sektor pertanian dikarenakan sektor tersebut merupakan potensi terbesar di Lamongan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Lamongan yakni 1,59% pada tahun 2016. lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini.



Gambar 1.1 Kontribusi pada PDRB sumber. Berita Resmi Badan Pusat Statistik Lamongan No. 03/06/3524/Th.II, 14 Juni 2016.

Berdasarkan gambar 1.1 juga menunjukkan penurunan tingkat PDRB pertanian pada tahun 2014 yakni 1,88% menjadi 1,7% di tahun 2015 dan semakin menurun pada tahun 2016 yakni 1,59%. Padahal program GEMERLAP telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan pemerintah telah memberikan bantuan pada berbagai kelompok pertanian. Pada tahun 2011 pemerintah memberikan 293

handtraktor pada 293 kelompok tani dan pompa air sebanyak 111 kepada 111 kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Lamongan. Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Lamongan meningkat dari tahun 2014, 2015, dan 2016. Indeks kedalaman kemiskinan Lamongan pada tahun 2014, 2015, dan 2016 meningkat dari 1,75% menjadi 2,25% dan meningkat 2,40%. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan Lamongan meningkat dari tahun 2014 yakni 0,36% meningkat pada 2015 sebesar 0,58% menjadi 0,66% di tahun 2016.

Walaupun demikian, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pendapatan per kapita warga Lamongan pada 2011 adalah Rp 11,3 juta per tahun dengan PDRB Rp 13,4 triliun. Pada 2013, nilainya naik menjadi Rp 15 juta per tahun dengan PDRB Rp 17,6 triliun. Tingkat kemiskinan warga Lamongan pun menurun signifikan, yakni dari 18,7 persen pada 2011 menjadi 14,5 persen pada 2013. Termasuk indeks pembangunan manusia (IPM) naik menjadi 71,42 pada 2013 dari 70,52 pada 2011. Data diatas mengindikasikan bahwa terjadi degradasi program GEMERLAP terutama di sektor pertanian.

Objek penelitian ini adalah kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” Desa Candisari Kecamatan Sambeng. Hal tersebut dikarenakan kelompok tani tersebut berhasil mengembangkan komoditas pertanian baru yakni pepaya Calina. Padahal, wilayah selatan Lamongan tersebut memiliki tanah yang kering dan kritis sehingga komoditas pertaniannya hanya padi, jagung, dan kedelai. Kondisi tersebut berimplikasi pada hasil produksi pertanian dan ekonomi masyarakat petani. Terbukti berdasarkan data BPS produksi padi mengalami stagnasi yakni pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 32.947,0 Ton-GKG. Selain itu, produksi jagung juga stagnan pada tahun 2015 dan 2016 yakni 42.076 Ton. Akan tetapi, kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” berhasil mengembangkan pepaya Calina serta meraup omzet 18 sampai 20 juta perbulan.

Seperti yang dikatakan oleh Ilham, petani pepaya Celina dalam [finance.detik.com](http://finance.detik.com) (21/10/2016, diakses pada 16:02 WIB) bahwa,

"Jika faktor kegagalan panen bisa ditekan, beberapa petani bahkan bisa meraup Rp 20 juta per bulan dari setiap hektar kebun Pepaya Calina," paparnya. (finance.detik.com (21/10/2016)).

Keberhasilan petani tersebut yang melatarbelakangi kelompok tani tersebut dimasukkan dalam program GEMERLAP atas instruksi Bupati Lamongan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Fadeli, Bupati Lamongan dalam m.timesindonesia.co.id (21/10/2016, diakses pada 16:23 WIB) bahwa,

"Saya minta ini dimasukkan dalam Program Gemerlap, sehingga bisa menerima berbagai bantuan program pemberdayaan. Nanti bisa dibuatkan koperasi, diberikan pelatihan, atau diberikan unit pengolah pupuk organik,"

Kelompok Tani Holtikultura "Godong Ijo Sejahtera" mengikuti program GEMERLAP dan memperoleh bantuan. Bantuan tersebut adalah pupuk yang terdiri dari Pupuk KCI 7000 kg, Pupuk Organik 9800 kg, Pupuk Organik Cair 168 lt, dan 14 Liter Pestisida. Kemudian, bantuan tersebut dibagikan kepada para anggota kelompok tani. Kelompok Tani Holtikultura "Godong Ijo Sejahtera" termasuk dalam program GEMERLAP pertanian dan memperoleh bantuan modal. Pemkab bekerjasama dengan masyarakat dan swasta sesuai dengan paradigma *New Public Service (NPS)* dalam mengembangkan komoditas pertanian. *New public Service* merupakan paradigma administrasi yang menekankan kepentingan masyarakat sehingga negara dituntut memberikan kinerja yang optimal. Deinhart and Deinhart menawarkan konsep yang berfokus pada bentuk pembangunan bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan menggunakan fungsi manajemen milik Gulick and Urwick yakni POSCORB (*panning, organizing, directing, cordinating, dan budgeting*). Selain itu, Prinsip dasar *New public Sevice* menurut Deinhart and Deinhart adalah demokratisasi sehingga kebijakan atau program membutuhkan kerjasama berbagai aktor yakni pemerintah, masyarakat swasta, dan NGO atau LSM.

Ada tiga aktor utama dalam program GEMERLAP di Desa Candisari Kecamatan Sambeng yakni Pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah yaitu Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan

sedangkan swasta yakni CV Negeri Hijau Indonesia, dan masyarakat yakni kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”. Ketiga aktor tersebut saling berkaitan dalam mensukseskan program. Namun, tidak ada interaksi antara Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan dengan CV Negeri Hijau Indonesia. Padahal berdasarkan Juklak GEMERLAP Dinas bertanggungjawab untuk melaksanakan pelatihan, pembinaan dan pendampingan dengan mendatangkan narasumber. Namun, sebaliknya yang melaksanakan pelatihan dan pembinaan pengembangan budidaya pepaya Calina bukan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan tetapi CV Negeri Hijau Indonesia. Dinas juga tidak mengetahui bahwa CV Negeri Hijau Indonesia melaksanakan pelatihan dan pembinaan pada kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”. Hal tersebut dikarenakan kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” melaksanakan kerjasama dengan CV Negeri Hijau Indonesia. Sehingga hasil panen pepaya dijual ke CV Negeri Hijau Indonesia dan kelompok tani memperoleh pelatihan dan pembinaan secara intensif.

Pelatihan dan pendampingan tersebut dilaksanakan secara bertahap agar terbentuk sentra ekonomi masyarakat baru. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa tahapan untuk mencapai kemandirian usaha mulai dari tahapan awal yakni persiapan sampai dengan perkembangan usaha sehingga dapat dilepas. Usaha budidaya pepaya Calina menjadi sentra ekonomi baru pada masyarakat di Desa Candisari dan Kecamatan Sambeng. Hal tersebut terbukti dengan jumlah petani dalam kelompok tani yang meningkat dari 12 menjadi 112 dan omset yang diperoleh petani sebesar 20 juta per bulan. Akan tetapi, usaha budidaya pepaya tersebut kemudian tiba-tiba berhenti dan menghilang. Oleh karena itu, harus dilaksanakan evaluasi program GEMERLAP di Desa Candisari Kecamatan Sambeng tersebut. Kondisi demikian dikarenakan untuk mengetahui dan mengukur ketercapaian target yang telah ditetapkan. James P. Lester dan Joseph Stewart menjelaskan, bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (James P. Lester & Joseph

Stewart, dalam Budi Winarno 165:23). Oleh karena itu, harus dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui hasil atau output dari program GEMERLAP serta penyebab berhentinya program tersebut di Desa Candisari agar dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perumusan maupun pelaksanaan suatu program.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana evaluasi program GEMERLAP (Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan) pada kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” di Desa Candisari Kecamatan Sambeng pada tahun 2017?

## **1.3 Tujuan**

Janu Murdiyatmoko (2007) menjelaskan bahwa tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin ditemukan dalam penelitian tersebut dan dikemukakan dalam bentuk pernyataan. Kemudian, tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis atau deskripsi sementara dari asumsi. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. (Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember Edisi Ketiga, 2011:21) Berdasarkan pengertian tersebut tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi program GEMERLAP yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Lamongan di Desa Candisari Kecamatan Sambeng.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian perlu dikemukakan dalam rancangan penelitian agar diketahui hasil yang akan dicapai dan untuk siapa hasil penelitian ini dilaksanakan. Menurut Janu Murdiyatmoko (2007) manfaat penelitian dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi, sedangkan manfaat praktis digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.

#### **4.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu Kebijakan Publik terutama berkaitan dengan program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang program pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang sejenis atau selanjutnya.

#### **4.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pemerintah dalam memutuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, terutama lembaga-lembaga yang berweanang dalam memutuskan kebijakan publik atau inovasi program untuk mengurangi tingkat kemiskinan berbasis pedesaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pihak-pihak terkait yang memiliki ketertarikan dan kepedulian terhadap evaluasi program pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan berbasis desa.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Dasar

Konsep dasar merupakan langkah awal peneliti untuk menentukan konsep dasar yang digunakan sebagai dasar teoritis dalam membuat kerangka berpikir penelitian. Ausubel (dalam Halomoan 2008:3) mengungkapkan bahwa “Konsep adalah benda-benda, kejadian-kejadian, situasi-situasi, atau ciri-ciri yang memiliki ciri khas dan yang terwakili dalam setiap budaya oleh suatu tanda atau simbol (*objects, events, situations, or properties that possess common critical attributes and are designated in any given culture by some accepted sign or symbol*). Sedangkan Berg (1991:8) mengungkapkan bahwa “Konsep merupakan abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antara manusia dan yang memungkinkan manusia berfikir (bahasa adalah alat berfikir)”. Konsep dasar yang telah ditentukan akan digunakan untuk membentuk kerangka teoritik yang tersusun dari teori-teori. Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. (Neumen dalam Sugiyono, 2010:52). Jadi berdasarkan berbagai definisi diatas;

- a. *New Public Service*
- b. Kebijakan Publik
- c. Evaluasi
- d. Program Pemberdayaan
- e. GEMERLAP (Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan)

#### 2.1.1 *New Public Service (NPS)*

Perkembangan paradigma administrasi berimplikasi terhadap pemerintahan di suatu negara. Old Public Administration menjadi fondasi awal bahwa administrasi dan politik harus didikotomikan. Kemudian, New Public Management sebagai kritik terhadap OPA dan lebih memperhatikan proses dari

administrasi publik yakni organisasi dan manajemen. Selanjutnya *New Public Service* lahir dengan menawarkan konsep administrasi publik yang lebih menekankan pada obyek yakni masyarakat. Selain itu, NPS lebih mengutamakan peningkatan kualitas pelayan publik dengan melihat masyarakat sebagai warga negara bukan konsumen. Tabel berikut ini sebagai pembeda antara *Old Public Administration*, *New Public Management*, dan *New Public Service*.

	<i>Old Public Administration</i>	<i>New Public Management</i>	<i>New Public Service</i>
<b>Teori dasar Dan fondasi epistemologi</b>	Teori-teori politik, sosial dan politik dengan mempertajam pada ilmu-ilmu sosial yang terbatas	Teori-teori Ekonomi, terutama dialog-dialog yang kompleks berdasarkan para positivis dalam ilmu sosial	Teori-teori Demokrasi, dengan pendekatan yang bervariasi untuk keilmuan termasuk positif, kritik dan kajian-kajian postmodern
<b>Penggunaan rasionalitas dan kerjasama antara perilaku model-model kemanusiaan</b>	Sinopsis Rasionalitas, “administrative man”	Rasionalitas teknis dan ekonomi, “economic man” atau kepentingan pengambil keputusan yang lebih ditonjolkan	Strategi rasionalitas berupa berbagai macam ujian rasionalitas di politik, ekonomi dan organisasi
<b>Konsepsi dalam kepentingan public</b>	Mendefinisikan politik dan mengekspresikannya dalam hukum atau undang-undang	Agregasi keterwakilan dari kepentingan individual	Adanya dialog tentang nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat
<b>Kepada siapa pelayan publik merespon?</b>	Klien dan konstituen	Kostumer	<i>Citizen</i> (warga negara)
<b>Peran pemerintah</b>	<i>Rowing</i> (mengayuh) mendesain dan mengimplementasikan kebijakan dengan memfokuskan pada satu definisi tujuan	<i>Steering</i> (mengarahkan) bertindak sebagai “katalis” untuk melepaskan dorongan pasar	<i>Serving</i> (Pelayanan) Negosiasi dan brokering kepentingan diantara warga negara Dan kelompok

Tabel 2.1 Perbandingan Paradigma OPA, NPM, dan NPS

Sumber: Diadopsi dari Denhardt dan Denhardt, 2000: 28-29.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbedaan antara ketiga paradigma tersebut. Paradigma NPS yang lebih mengutamakan pelayanan daripada mengarahkan ataupun mengayuh. Kemudian lebih didasarkan pada nilai kebersamaan dan demokrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa NPS lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan culture masyarakat.

Janet V Denhart dan Robert B Denhart (2003) bahkan menyebutkan bahwa publik sebagai *citizen* merupakan akar manajemen pelayanan publik perspektif baru (*new public service*). Pada dasarnya *New Public Service* karya Denhart and Dendhrat memiliki maksud sebagai counter paradigm atau mendekonstruksi prinsip dari *new public management* karya Osborne dan Gaebler. Kondisi demikian agar paradigma administrasi lebih mencerminkan dan sesuai dengan keadaan terkini. Prinsip dari *New Publik Service* adalah;

1. Melayani Warganegara bukan customer
2. Mengutamakan kepentingan publi
3. Kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan
4. Mengetahui bahwa akuntabilitas bukan suatu hal yang sederhana
5. Melayani daripada mengarahkan
6. Menghargai manusia bukan sekedar produktivitas

Berdasarkan beberapa definisi para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa paradigma *New Publik Service* adalah paradigma yang melibatkan masyarakat, pemerintah dan swasta secara aktif dalam pembangunan nasional. Kondisi demikian melahirkan bentuk kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta baik dalam bentuk kolaborasi, kemitraan atau lainnya.

### **2.1.2 Kebijakan Publik**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kebijakan publik maka mengkaji kebijakan terlebih dahulu. Menurut Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
- k. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Kemudian, kebijakan menurut Carl Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson tersebut menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara

kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Kemudian kebijakan publik menurut Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- b. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Sedangkan Menurut Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah adalah “segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (*what government did, why they do it, and what differences it makes*)”. Kemudian menurut William N. Dunn terdapat 5 tahapan dalam penyusunan kebijakan publik yakni;

- a. Tahap Perumusan Masalah Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
- b. Tahap Forecasting (Peramalan) Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak kebijakan.
- c. Tahap Rekomendasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
- d. Tahap Monitoring Kebijakan Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

- e. Tahap Evaluasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar 2.1 Tahapan kebijakan publik  
Sumber: William N Dunn, Analisis Kebijakan Publik

Berdasarkan beberapa definisi para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu yang dikerjakan ataupun tidak dikerjakan oleh pemerintah yang melibatkan antar unit pemerintah serta lingkungannya dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan publik. Kebijakan lahir dari berbagai alternatif yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Kemudian ada beberapa tahapan mulai dari penyusunan agenda sampai evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan harus dievaluasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi.

### 2.1.3 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir dalam Widodo (2008:112), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi kebijakan dapat dilaksanakan menggunakan pendekatan tertentu. Ada beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan yakni pendekatan Evaluasi Keputusan Teoritis, Evaluasi Semu, dan Evaluasi Formal. Evaluasi semu (*Pseudo Evaluation*) adalah

pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Sedangkan Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal merupakan indikator yang tepat untuk mengukur manfaat atau nilai kebijakan program. Berikut ini perbedaan diantara tiga pendekatan evaluasi.

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk utama
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eksperimentasi sosial</li> <li>- akuntansi sistem sosial</li> <li>- pemeriksaan sosial</li> <li>- sintesis riset dan praktik</li> </ul>
Evaluasi Formal	menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan serta administrator resmi diumumkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- evaluasi perkembangan</li> <li>- evaluasi eksperimental</li> <li>- evaluasi proses retrospektif</li> <li>- evaluasi hasil</li> </ul>

	mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal	merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	retrospektif
Evaluasi Keputusan Teoritis	menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi</li> <li>- analisis utilitas multiatribut</li> </ul>

Tabel. 2.2 Perbedaan pendekatan evaluasi kebijakan publik  
Sumber: William N. Dunn, 2003

Dalam evaluasi formal, analisis menggunakan metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan, termasuk juga dampak yang dapat dilacak sebagai masukan dalam proses kebijakan. Meskipun demikian, perbedaannya adalah bahwa evaluasi

formal menggunakan undang-undang, dokumen-dokumen program dan wawancara dengan pembuat kebijakan. Demikian juga dalam analisis evaluasi formal ini, para administrator dapat mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target dari kebijakan. Dalam evaluasi formal, tipe-tipe kriteria evaluatif yang paling sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi.

Salah satu tipe utama evaluasi formal adalah evaluasi sumatif yang meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi sumatif diciptakan untuk menilai produk- produk kebijakan dan program publik yang stabil dan mantap. Sebaliknya, evaluasi formatif meliputi usaha-usaha untuk secara terus menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal. Perbedaan antara evaluasi sumatif dan formatif terletak pada jumlah titik waktu di mana hasil kebijakan dipantau. Karena itu, perbedaan antara evaluasi sumatif dan formatif adalah persoalan derajat. Evaluasi formal selain bersifat sumatif atau formatif, juga dapat melakukan kontrol langsung atau tidak langsung terhadap masukan dan proses-proses kebijakan. Dalam kontrol langsung, evaluator dapat memanipulasi secara langsung tingkat pengeluaran, campuran program, atau karakteristik kelompok sasaran. Artinya evaluasi dapat mempunyai satu atau lebih karakteristik eksperimen sosial sebagai pendekatan terhadap pemantauan.

James Anderson (2007:227) membagi kebijakan kedalam tiga tipe yang didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap kebijakan. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional yakni evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Sehingga pembentuk kebijakan dan administrator membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan, program, dan proyek yang didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan para pendukungnya, dan kriteria-kriteria lainnya. Namun, evaluasi tipe ini akan mendorong terjadinya konflik karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeda.

Sehingga kesimpulan yang didapatkannya pun berbeda-beda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama. Tipe kedua, tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu. Evaluasi ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun, kelemahannya adalah kecenderungan untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat. Tipe ketiga adalah tipe evaluasi sistematis yakni melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya pada para pembentuk kebijakan dan masyarakat umum.

Dalam buku Riant Nugroho (2011: 676), Bingham dan Felbinger membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis:

- a. Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan
- b. Evaluasi dampak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan
- c. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan
- d. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan terkait.

Kriteria yang digunakan dalam evaluasi kebijakan program GEMERLAP adalah kriteria evaluasi menurut William N Dunn (2003:610) yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Ilustrasi</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, Rasio cost-benefit.
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, efektifitas Tetap
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok berbeda?	Kriteria pareto, kriteria kaldor-hicks, kriteria rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?	Konsistensi survei negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Tabel 2.3 Tipe Evaluasi Kebijakan Publik Menurut Dunn  
Sumber: William N. Dunn, 2003

Berdasarkan tabel diatas menurut Dunn, bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- b. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki. Kebijakan yang

mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

- c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan berkenaan dengan empat tipe masalah:

EFEKTIVITAS	BIAYA	
	Tetap	Berubah
Tetap	Tipe IV (Biaya sama- efektivitas sama)	Tipe II (Efektivitas-sama)
Berubah	Tipe I (biaya-sama)	Tipe III (biaya berubah- efektivitas berubah)

Tabel 2.4 Empat Tipe Masalah dalam Kriteria Kecukupan

Sumber: William N. Dunn, 2003

- 1) Masalah Tipe I, Masalah dalam tipe ini meliputi ongkos tetap dan efektivitas berubah. Jika pengeluaran budgeter maksimum yang dapat di terima menghasilkan biaya tetap, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia. Tanggapan untuk masalah tipe pertama disebut analisis biaya sama (*equal cost analysis*), karena analisis membandingkan alternatif efektivitas yang berubah tetapi biayanya tetap. Di sini kebijakan yang paling memadai adalah yang dapat memaksimalkan pencapaian tujuan dengan biaya tetap yang sama.
- 2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah. Jika tingkat hasil yang dihargai sama, tujuannya adalah meminimalkan biaya. Jawaban terhadap masalah tipe II disebut analisis efektivitas-sama (*equal-effectiveness analysis*), karena analisis membandingkan beberapa alternatif dengan biaya yang berubah tetapi efektivitasnya tetap. Di sini kebijakan yang

paling memadai adalah yang dapat meminimalkan biaya dalam mencapai tingkat efektivitas yang tetap.

- 3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya yang berubah. Jawab terhadap masalah ini disebut analisis biaya-berubah-efektivitas-berubah (*variable-cost-variable-effectiveness analysis*), karena biaya dan efektivitas dapat berbeda. Di sini kebijakan yang paling memadai adalah yang dapat memaksimalkan rasio efektivitas terhadap biaya.
  - 4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap. Masalah tipe IV, yang menuntut analisis biaya sama efektivitas sama, sulit dipecahkan. Analisis tidak hanya dibatasi oleh persyaratan agar biaya tidak melebihi tingkat tertentu tetapi juga dibatasi oleh kendala bahwa alternatif harus mencapai tingkat efektivitas yang telah ditentukan.
- d. Perataan atau kesamaan (*equity*), erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk didistribusikan kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kesamaan. Satu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi dibanding program lainnya. Namun, mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa kondisi.
  - e. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
  - f. Kelayakan atau ketepatan (*appropriateness*), berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat. ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan kriteria tersebut maka akan dapat diketahui ketercapaian atau keberhasilan program. Selanjutnya, kebijakan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk suatu program baik program pemberdayaan, pembangunan, ataupun lainnya. Program tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah yang memperoleh program.

#### **2.1.4 Program Pemberdayaan**

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Winarno mengemukakan pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya, terciptanya kemandirian (Ardito, 2017:24). Pemberdayaan adalah memberikan kekuatan pada pihak yang kurang atau tidak berdaya agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Pemberdayaan yang dimaksud tidak mengarah pada individu semata, tetapi juga kolektif (Ulum, 2016:145).

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Prajono dan Pranarka, 1996:229).

Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasangkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan.

Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to everybody*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan *abuse* dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasi. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri. Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan *power to nobody* dan pandangan *power to everybody*. Menurut pandangan ini, *Power to nobody* adalah kemustahilan dan *power to everybody* adalah *chaos* dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah *power to powerless* (Pranarka dan Vidhyandika, 1996 : 45-70).

Program pemberdayaan adalah program yang disusun oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang. Ada berbagai program dan kebijakan pemberdayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu program tersebut adalah program GEMERLAP (Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan) yang ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan.

### 2.1.5 GEMERLAP

GEMERLAP merupakan salah satu program inovasi Pemkab Lamongan di bidang ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan dan membangun ekonomi desa. Pelaksanaan program tersebut dimulai sejak tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2011. Kemudian, program GEMERLAP bersifat penguatan (*enabling*), memotivasi atau mendorong (*encourage*), dan membangkitkan kesadaran (*awareness*). Hal tersebut berarti bahwa pada dasarnya program GEMERLAP adalah menguatkan ekonomi masyarakat melalui kelompok usaha. Masyarakat berhimpun dan membuat kelompok usaha berdasarkan potensi desa. Selanjutnya, bantuan yang diberikan Pemkab melalui program GEMERLAP baik berbentuk modal maupun pendampingan dapat memotivasi masyarakat untuk semakin berusaha. Selain itu,

dapat memotivasi desa lain untuk membuat suatu kelompok usaha. Keberhasilan suatu desa dapat memotivasi desa lain untuk berusaha. Kemudian, program GEMERLAP juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat berkaitan dengan potensi desa yang dapat dioptimalkan dengan membentuk suatu kelompok usaha baru.

Struktur program GEMERLAP merupakan bentuk kerjasama antar lintas SKPD (Pertanian dan Kehutanan; Perternakan; serta Koperasi, Perdagangan, dan dan Industri). Program GEMERLAP diawali dengan dua tahap yakni tahap pertama sosialisasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan di kantor bupati. Sedangkan, tahap kedua tingkat kecamatan dilaksanakan di kantor kecamatan. Sehingga struktur programnya bersifat top-down dari pemerintah kabupaten ke kecamatan, baru kemudian ke desa dan kelompok usaha mandiri. Selain itu, tumbuh suburnya BUMMDes yang dapat membantu permodalan dan kemajuan ekonomi desa. Kota Lele tersebut memiliki potensi BUMDes yang banyak yakni mencapai 225 unit pada tahun 2016. Perpaduan antara BUMDes dan GEMERLAP diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan.

Masyarakat dapat memperoleh bantuan dari program GEMERLAP setelah memenuhi beberapa persyaratan utama yakni; telah memiliki usaha mandiri yang dapat dikembangkan untuk menjadi usaha masyarakat desa dan membuat proposal pengajuan. Setelah itu, kelompok-kelompok masyarakat diseleksi. Kemudian, kelompok masyarakat yang lolos seleksi akan diverifikasi oleh tim verifikasi yang terdiri dari SKPD-SKPD pelaksana program. Berdasarkan peraturan pemerintah Kabupaten Lamongan sasaran dari Program GEMERLAP (Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan) adalah sebagai berikut;

- a. Masyarakat pedesaan yang telah mempunyai usaha mandiri, yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi usaha masyarakat desa yang kemudian akan menjadi produk unggulan desa tersebut. Hal ini dimaksudkan usaha yang telah ada dijadikan motivasi sekaligus bengkel kerja masyarakat desa tersebut;

- b. Kegiatan yang dapat diusulkan untuk memperoleh pembiayaan dari GEMERLAP hanya kegiatan yang dapat menjangkau dan mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk desa tersebut dengan pola bergulir.

Pada tahun 2011 Pemkab memberikan bantuan 2.200 kambing di 11 desa 3 kecamatan, bebek sebanyak 20.000 ekor di 8 desa 2 kecamatan, lele sebanyak 186 paket (per paket terdiri dari 1 terpal, 1.500 – 1.800 ekor ikan 1 unit pompa) yang diperuntukan bagi 16 kelompok pembudidaya ikan di 13 desa 8 kecamatan, ikan nila dan ikan patin sebanyak 11 paket (keramba berukuran 16 x 20 m dan ikan sebanyak 54.500 ekor/paket) yang diperuntukan bagi 11 kelompok pembudidaya ikan di 5 desa 2 kecamatan, di Desa Tritunggal Kecamatan Babat, Pemerintah Kabupaten telah memberikan berupa Neon Box sebanyak 133 unit, papan promosi (schelter) sebanyak 2 dan lahan parkir seluas 210 m<sup>2</sup>, Desa Sedangagung dan Sendangdhuwur Kecamatan Paciran, Pemerintah Kabupaten telah memberikan berupa Neon Box sebanyak 50 unit, papan promosi (schelter) sebanyak 2 lahan parkir seluas 300 m<sup>2</sup> dan tempat informasi serta toilet. Pemberian bantuan tersebut merupakan langkah awal realisasi program GEMERLAP.

Kemudian, tujuan program GEMERLAP telah ada dalam aturan perundang-undangan dan juknis dalam melaksanakan program adalah sebagai berikut;

- a. menggerakkan lebih terencana, terarah, terukur ekonomi masyarakat pedesaan melalui pemberian bantuan modal (hibah/pinjaman) bergulir mengefektifkan kelompok-kelompok usaha pedesaan yang sudah ada sebagai basis inovasi dan merehabilitasi atau membangun sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung sistem produksi, distribusi barang dan jasa;
- b. meningkatkan fungsi sarana dan prasarana ekonomi rakyat dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan;
- c. mengembangkan produk unggulan tiap desa dan menciptakan akses pasar ideal lokal menuju regional, nasional, dan global;

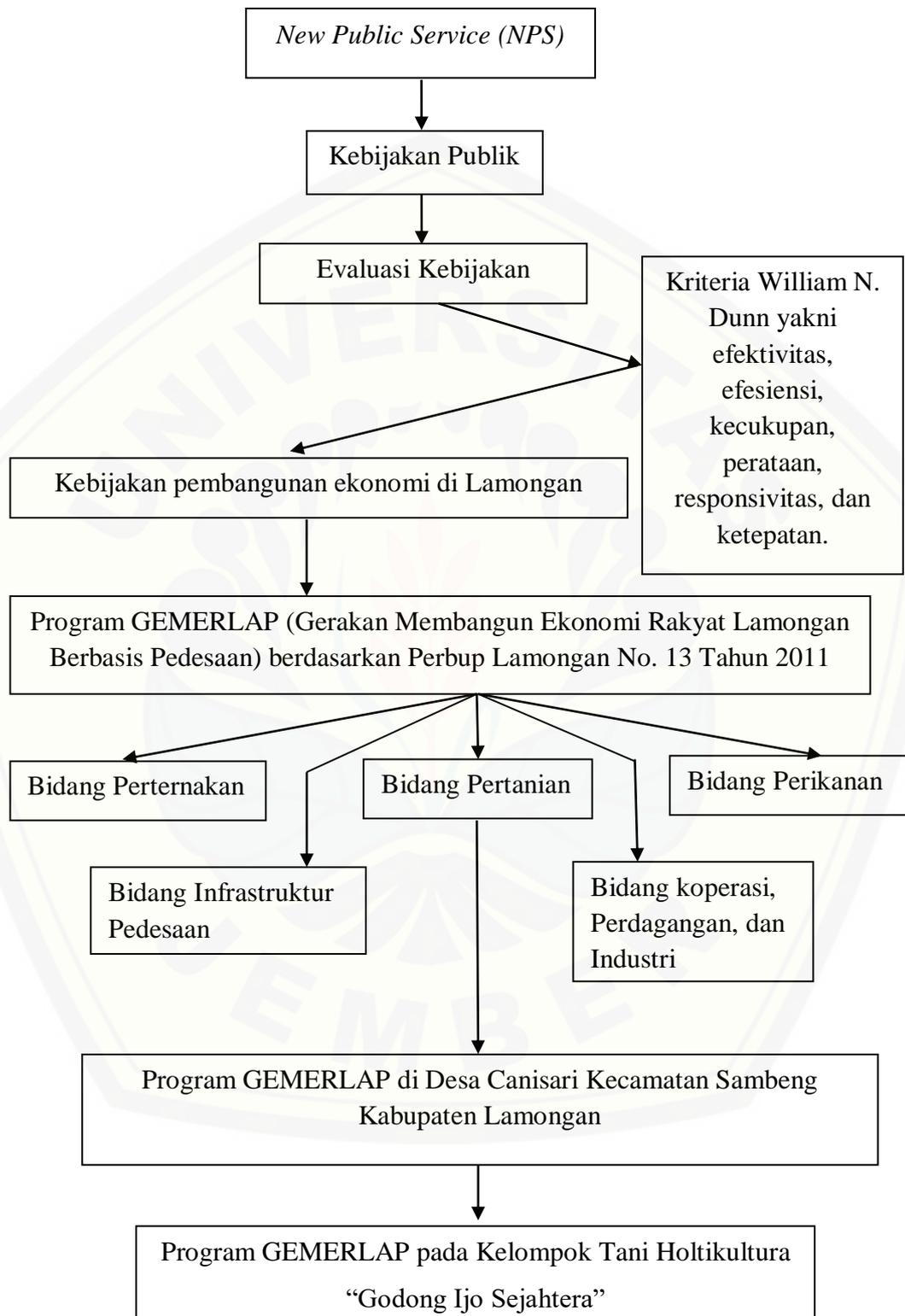
- d. meningkatkan peran dan koordinasi SKPD dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan;
- e. meningkatkan kemitraan dan sinergitas stake holder (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam membangun pedesaan yang berkelanjutan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

<b>Judul Penelitian</b>	Evaluasi program Gemerlap di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Budidaya Ikan Kerapu	Dampak gemerlap Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan Kelompok Ternak Sumber Rejeki.
<b>Tahun Penelitian Lembaga</b>	Niken Puspita Sari, 2015 UNESA	Anita Rahayu, 2016 UNESA
<b>Metode Penelitian</b>	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif
<b>Rumusan Masalah</b>	Bagaimana evaluasi program Gemerlap di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, Budidaya Ikan Kerapu?	Bagaimana Dampak Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) Di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan (Studi Pada Kelompok Ternak Sumber Rejeki)?
<b>Hasil Penelitian</b>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program GEMERLAP di Desa Labuhan dilihat dari kriteria efektifitas masih dikatakan belum efektif dibuktikan dengan bantuan yang tidak memberikan manfaat untuk	secara keseluruhan Program Gemerlap ini telah memberikan dampak. Banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya program ini. Dalam pelaksanaanya, Program Gemerlap di Desa Tawangrejo sudah memberikan dampak terhadap

	<p>petani Desa labuhan. Program ini juga dirasa kurang efisien dalam hal dana, tidak adanya fasilitator dan konsultan pendamping, serta Program GEMERLAP di Desa Labuhan tidak tepat sasaran apabila diberikan kepada masyarakat Labuhan dengan usahanya yang sudah berkembang. Dalam kriteria responsifitas, respon masyarakat petani kurang ditandai dengan tidak adanya kemauan dalam mengajukan permohonan bantuan melalui proposal.</p>	<p>kelompok sasaran maupun masyarakat yang bukan kelompok sasaran.</p>
<b>Persamaan dengan Penelitian</b>	<p>Membahas konsep evaluasi kebijakan, Membahas program GEMERLAP</p>	<p>Membahas program GEMERLAP</p>
<b>Perbedaan dengan Penelitian</b>	<p>a. Tempat penelitian b. Obyek penelitian</p>	<p>a. Tempat penelitian b. Obyek penelitian c. Menguakan analisis dampak</p>

### 2.3 Kerangka Konseptual



### BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (2009:6) adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Sedangkan J.R Raco metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Yulianto (2016:4) mendefinisikan metode penelitian sebagai pemahaman atau pengkajian tentang berbagai metode-metode dan teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian, baik penelitian dalam desain kuantitatif maupun desain kualitatif. Singkatnya, metode penelitian adalah cara-cara berpikir untuk melakukan penelitian dan teknik penelitian adalah cara melakukan penelitian atas dasar hasil pemikiran.

Metode penelitian yang diperlukan oleh peneliti meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- b. Tempat dan Waktu Penelitian
- c. Obyek dan
- d. Fokus Penelitian
- e. Penentuan Informan Penelitian
- f. Data dan Sumber Data
- g. Metode Pengumpulan Data
- h. Teknik Analisis Data

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data.(Hadari Nawawi,2002: 63)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J (1988;24) yang dimaksud penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-menemuan yang tidak dapat dicapai (diproleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Bogdan dan Taylor (1992) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan-ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Berdasarkan definisi diatas maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal tersebut dikarenakan untuk mengkaji fenomena dan data yang diperoleh dalam penelitian. Penelitian tentang evaluasi biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif. Namun, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mengevaluasi secara mendalam dan detail.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Sehingga tempat penelitian merupakan lokasi untuk pelaksanaan penelitian dan memperoleh data serta informasi. Penelitian ini dilaksanakan pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” di Desa Candisari Kecamatan Sambeng sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun. Fokus utama penelitian memperoleh data dari kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”.

Waktu penelitian yakni peneliti melaksanakan penelitian dimulai pada 19 April sampai 22 Juni 2018. Peneliti membutuhkan waktu dua bulan untuk mengurusn ijin, melaksanakan observasi, wawancara, dan memperoleh data.

### **3.3 Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu (Sugiyono, 2007:215). Sedangkan, menurut

Suharismi Arikunto (2001:5) menyatakan “Objek penelitian merupakan ruang lingkup atau hal-hal yang menjadi pokok persoalan dalam suatu penelitian.” Berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, Objek penelitian adalah ruang lingkup penelitian baik tempat, aktor, aktivitas maupun lainnya. Oleh karena itu, objek dalam penelitian ini meliputi:

- a. Tempat Penelitian  
di Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan
- b. Aktor
  - 1) Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”
  - 2) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Lamongan
- c. Aktivitas meliputi
  - 1) Gambaran kinerja program GEMERLAP pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” di Desa Candisari Kecamatan Sambeng
  - 2) Pelaksanaan program GEMERLAP di Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan
  - 3) Mengevaluasi proses seleksi dan penyaluran bantuan melalui program Gemerlap di Desa Candisari Kecamatan Sambeng
  - 4) Mencari dan mengetahui output serta outcome dalam pelaksanaan program GEMERLAP di desa Candisari Kecamatan Sambeng.

Subjek penelitian menurut Arikunto (2006 : 145) adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Sedangkan Moleong (2010: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, subjek penelitian adalah sumber yang dimintai informasi tentang penelitian yakni evaluasi program GEMERLAP di desa Candisari Kecamatan Sambeng. Subjek dalam penelitian ini adalah semua aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan program tersebut terutama SKPD terkait yakni Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan dan kelompok Tani Holtikultura “Godong

Ijo Sejahtera”. Berdasarkan subjek penelitian, maka peneliti menggunakan purposive sampling yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi peneliti dalam pengumpulan data sehingga dalam proses pengumpulan data sesuai dengan rumusan permasalahan yang ditetapkan dan relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada Evaluasi program GEMERLAP pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” di Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Peneliti mengevaluasi program menggunakan teori evaluasi kebijakan publik milik William N. Dunn dengan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Peneliti juga membatasi penelitian ini pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo” dan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Lamongan

### 3.5 Penentuan Informan Penelitian

Informan dalam penelitian memiliki peran penting yakni sebagai subyek penelitian yang memberikan informasi terkait topik penelitian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Idrus (2009:91) yang menyatakan bahwa subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Selanjutnya juga idrus menjelaskan bahwa informan adalah orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti terkait penilaian yang sedang dilaksanakan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2011:96) *purposive* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang akan diteliti. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menentukan jumlah informan yang dinilai memenuhi kriteria sebagai informan untuk mendapatkan informasi terkait Evaluasi Program GEMERLAP di Desa Candisari Kecamatan

Sambeng pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera“ sebagai berikut:

1. Ibu Ida Suryawati selaku Kasubid Ekonomi Bappeda.
2. Bapak Salim selaku Kepala Seksi Holtikultura dan AKB
3. Bapak Kohar selaku kepala Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”
4. Bapak Umam selaku Sekertaris Desa Candisari
5. Bapak Hartono selaku Masyarakat Desa Candisari
6. Bapak Damar CV Negeri Hijau Indonesia

Data yang diperoleh dari Informan

No.	Nama	Data yang diperoleh
1.	Ibu Ida Suryawati	- Booklet GEMERLAP - Juklak GEMERLAP
2.	Bapak Salim	- Juknis Pepaya Calina - Laporan Pepaya Calina - Keputusan Bupati tentang alokasi bantuan hibah
3.	Bapak Kohar	- Sejarah Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” - Kronologi kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” memperoleh program GEMERLAP - Perkembangan Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” pra dan pasca memperoleh program GEMERLAP
4.	Bapak Umam	Profil Desa Candisari Kecamatan Sambeng
5.	Bapak Hartono	Informasi tentang dampak adanya program

		GEMERLAP kepada masyarakat
6.	Bapak Damar	Informasi tentang kerjasama antara CV negeri Hijau Indonesia dengan Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”

Tabel 3.1 Data yang diperoleh

### 3.6 Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti Sanusi (2014: 104). Sedangkan menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi, catatan hasil wawancara, dan data informan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Data yang dibutuhkan dan cara memperoleh

No	Data yang dibutuhkan	Sumber memperoleh data	Alat
1.	Petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk teknis program GEMERLAP	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Lamongan	Kamera, Draft wawancara, alat perekam
2.	Booklet GEMERLAP tahun 2017	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	Kamera, Draft

		Lamongan	wawancara, alat perekam
3.	Laporan atau Gambaran kinerja program GEMERLAP pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Lamongan</li> <li>- UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sambeng</li> <li>- Kelompok Tani Holtikultura “Godong ijo Sejahtera</li> </ul>	Kamera, Draft wawancara, alat perekam
4.	Data Bantuan yang diberikan pada Program GEMERLAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Lamongan</li> <li>- UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sambeng</li> <li>- Kelompok Tani Holtikultura “Godong ijo Sejahtera</li> </ul>	
5.	Proposal pengajuan bantuan untuk program GEMERLAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Lamongan</li> <li>- UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Sambeng</li> <li>- Kelompok Tani Holtikultura “Godong ijo Sejahtera</li> </ul>	Kamera, Draft wawancara, alat perekam

Tabel 3.1 Data yang Dibutuhkan dan Cara Memperoleh Data

### 3.7 Metode Pengumpulan Data

Burhan Bungin (ed) (2003: 42), menjelaskan metode pengumpulan data adalah “dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliabel”. Jadi, metode pengumpulan data dapat menggunakan instrumen pengumpulan data yang sesuai dengan data yang ingin diperoleh peneliti. Instrumen berperan penting dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan dibutuhkan instrumen yang tepat agar data dapat diperoleh secara valid. Jika instrumen yang digunakan oleh peneliti tidak tepat maka perolehan data sulit mencapai titik validitas. Oleh karena itu, peneliti harus menentukan instrumen penelitian yang tepat. Ada berbagai jenis instrumen pengumpulan data yakni;

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Menurut Anas Sudijono (1996: 82) ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna.

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun untuk mempermudah. Terdapat beberapa aktor yang diwawancara oleh peneliti yakni Kasubid Ekonomi Bappe, Kepala Seksi Holtikultura dan AKB, kepala Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”, sekretaris Desa Candisari, masyarakat Desa Candisari, dan CV Negeri Hijau Indonesia.

#### b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. metode observasi menurut Mardalis, adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

### c. Dokumen

Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Hadari Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumen adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Penelitian ini dapat menggunakan dokumen dari peraturan, juknis, laporan perkembangan ekonomi, dan lain sebagainya. Data dokumen yang diperoleh peneliti adalah Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011, Booklet GEMELAP tahun 2015 sampai 2017, Petunjuk pelaksana program GEMERLAP, Laporan akhir Pepaya Calina, Petunjuk teknis Pepaya Calina, Keputusan Bupati nomor 188/151/Kep/413.013/2017, dan Proposal pengajuan bantuan kelompok Tani Holtikultural “Godong Ijo Sejahtera”.

### d. Triangulasi

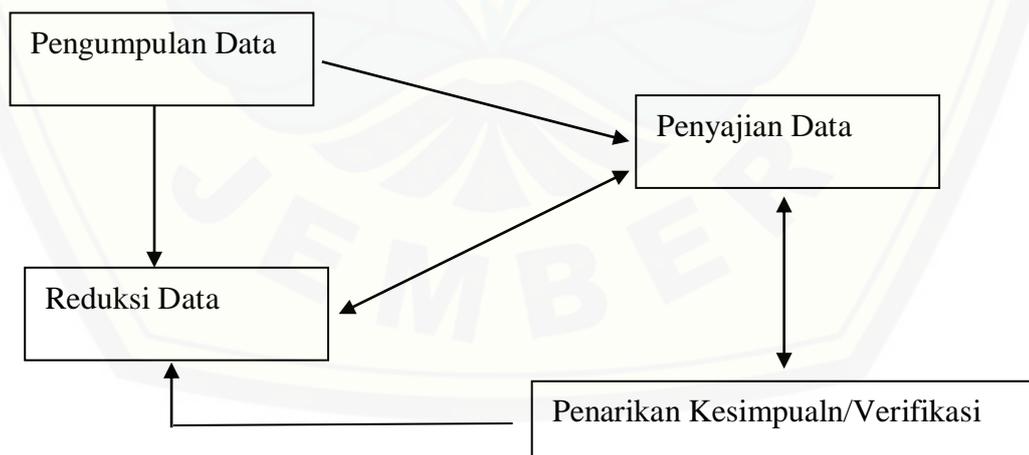
Triangulasi menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2007:330) merupakan “the aim is not to determinate the truth about same social phenomenon, rather than the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being investigated”. Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Triangulasi menggunakan metode pengumpulan data lainnya yakni wawancara, observasi, maupun dokumen.

## 3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:247), yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction), diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
2. Display Data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
3. Penarikan Kesimpulan Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Miles dan Huberman (dalam Idrus 2009:148) menjelaskan bahwa ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Gambaran model interaktif Miles dan Huberman sebagai berikut.



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman, 1992

Sumber: Idrus, 2009

Peneliti menggunakan semua langkah-langkah analisis dari Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif ini yakni reduksi data, penyajian data, dan

verifikasi data. Setelah data terinterpretasi maka peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber sebagai teknik analisis data.

### 3.9 Teknik Menguji Keabsahan Data

Moleong (2014:320) berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Hal ini dikarenakan keabsahan data tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif dan keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yakni derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Berikut ini teknik pemeriksaan keabsahan data yakni.

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (Derajat Kepercayaan)	1. perpanjangan keikutsertaan
	2. Ketekunan Pengamatan
	3. Triangulasi
	4. Pengecekan Sejawat
	5. Kecukupan Referensial
	6. Kajian Kasus Negatif
	7. Pengecekan Anggota
Transferbility (Keteralihan)	8. Uraian Rinci
Auditibility (Kebergantungan)	9. Audit Kebergantungan
Comfirmability (Kepastian)	10. Audit Kepastian

Tabel 3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Sumber: Moleong, 2014:327

Berdasarkan teknik pemeriksaan keabsahan data diatas maka peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data yakni:

#### 1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam penelitian kualitatif diharuskan dalam pengumpulan dan analisis data sehingga data yang diperoleh dan dianalisis dapat dijelaskan secara rinci. Moleong (2014:330) menjelaskan bahwa seorang peneliti seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan berkesinambungan

terhadap faktor-faktor yang menonjol dan kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.

## 2. Triangulasi

Moleong (2014:332) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Untuk membandingkannya, peneliti dapat melakukannya dengan jalan sebagai berikut:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b. mengecek dengan berbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

## 3. Kecukupan referensial

Hasil penelitian yang diperoleh dapat diuji dan dikoreksi dengan referensi yang diperoleh. Referensi tersebut berasal dari orang lain maupun selama penelitian yakni dari website, skripsi terdahulu, jurnal penelitian, serta dokumen terkait.

## 4. Pengecekan Anggota

Pengecekan anggota merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan mengecek anggota yang terlibat dalam pengumpulan data. Anggota yang terlibat dalam pengumpulan data dicek antara satu dengan lainnya terkait kebenaran dan interpretasi data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan topik penelitian. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara berikut:

- a. Penilaian dilakukan oleh responden
- b. Mengoreksi kekeliruhan
- c. Menyediakan tambahan informasi secara sukarela
- d. Memasukkan respon dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data
- e. Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi program gerakan membangun ekonomi rakyat Lamongan berbasis pedesaan (Studi deskriptif pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”) dengan menggunakan kategori William N. Dunn, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dari enam kriteria William N Dunn yang digunakan untuk mengevaluasi, hanya dua yang terpenuhi yakni perataan dan ketepatan. Sedangkan empat kriteria lainnya yakni efektivitas, efesiensi, kecukupan, dan responsivitas masih buruk. Kondisi tersebut dikarenakan minimnya peran pemerintah.
2. Minimnya peran pemerintah terutama Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan dikarenakan pepaya Calina bukan bagian dari Road-Map program. Pelaksanaan program untuk pepaya Calina tersebut atas dasar instruksi Bupati sehingga penyelenggaraan program kurang optimal. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan berfokus untuk mempersiapkan beberapa program, salah satunya adalah program GEMERLAP untuk komoditas cabe.
3. Program GEMERLAP di Desa Candisari pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan ada berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan program salah satunya adalah penyakit busuk batang yang menyerang pepaya Calina.

### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sajikan dari hasil analisis penelitian, peneliti dapat memberikaan saran terkait evaluasi program gerakan membangun ekonomi rakyat Lamongan berbasis pedesaan (Studi deskriptif pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan suatu program seharusnya mengikuti rencana program kerja yang telah disusun. Hal tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat lebih

optimal. Namun, apabila terdapat hal mendesak dapat dikoordinasikan dan kerjasama dengan instansi lainnya.

2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program GEMERLAP pada Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera” maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang penanganan penyakit. Selain itu, diperlukan pendampingan dan pembinaan dari pemerintah dan NGO kepada kelompok yang menerima bantuan hibah.
3. Peningkatan responsivitas program GEMERLAP perlu dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memonitoring program secara berkala sehingga ketika mengalami masalah maka dapat diatasi secara langsung.
4. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan sebaiknya memberikan materi tentang kemitraan atau kerjasama dalam sosialisasi program. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat memahami proses, tahapan, dan konsekuensi dalam melaksanakan kerjasama.
5. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan harus melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan monitoring program GEMERLAP sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Agar apabila ada masalah dalam kelompok tani, maka dapat diatasi secara langsung, cepat, dan tanggap. Sehingga dampak dari masalah tersebut dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anas, Sudijono. 1996. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Annas, Aswar. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar :Celebes Media Perkasa.
- Anwar, Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: Sage Publications.
- Denhardt, Janet Valerie and Denhardt, Robert B. 2003. *The New Publik Service: Serving Not Steering*. New York ME Sharpe Inc.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi 2*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Efendy, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Frederickson, George. 1988. *Adminidtrasi Negara Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Henry, Nicholas. 1995. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik (Public Administration and Public Affairs)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Islamy, M.Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara.
- Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.
- Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.
- Kadji, Yulianto. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kecamatan Sambeng Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nonci, Nurjannah. 2017. *Implementasi Program Gernas Kakao (Studi Kebijakan Gernas Kakao di Kabupaten Luwu)*. Makassar: CV Sah Media.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Edisi Ketiga, Revisi 2011. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo.
- Projono, Onny S dan Pranarka, A.M.W (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Raco, J.R. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Taufiqurohman.2014.*Kebijakan Publik: Pendelegasian Tangung jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maestopo Beragama (Pers).
- Ulum, M. Chazienul. 2016. *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*. Malang: UB Press.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: PT Buku Kita.
- Jurnal**
- Afiffudin. 2017. *Implementasi Konsep New Public Service (Studi Kasus Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Dinas Kesehatan Di Kota Malang Jawa Timur)*. Infodiknas
- Fahcrudin Reza. 2015.*Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4 No.2
- Hidayat, Ilyas Imron.\_\_\_\_. *Implementasi Program Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Lele Kolam Terpal Di Desa Kedukbembem Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan*. Universitas Negeri Surabaya.
- Hilman, Yusuf Adam. 2018. *Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas*. Jurnal Aristo Umpo Sosial Humaniora Vol. 6 No 1.
- Kadji, Yulianto. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.
- Kamil, Mustofa. 2006. *Strategi Kemitraan dalam Membngun PNF Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Model Keunggulan dan*

*Kelemanhan*. Departemen Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan

Kawenggian, Debby. 2015. *Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara*. e-journal "Acta Diurna" Volume IV. No.5.

Rahayu, Anita. \_\_. *Dampak Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) Di Desa Tawangrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan (Studi Pada Kelompok Ternak Sumber Rejeki*. Universitas Negeri Surabaya

Rahmad, Saeful Pupu. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Equilibrium Vol. 5, No. 9.

Royat, Sujana. \_\_. *Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan*.

Sururi, Ahmad, Arif Nugroho, dan Abdul Malik. 2017. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal Melalui Pemanfaatan IPTEK*. <https://www.researchgate.net/publication/319493010> (diakses pada 21:20, 11 September 2018)

Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda. 2008. *Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah Di Kalimantan*. PKP2A III LAN Samarinda.

Yuliani, Sri. 2011. *New Public Service: Mewujudkan Birokrasi yang Pro-Citizen*. Universitas Negeri Semarang

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (GEMERLAP) di Kabupaten Lamongan.

Undang-Undang Dasar 1945

UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

### **Website**

Ainun, Yatimul. 2016. *Lamongan Panen Raya Pepaya*. <https://m.timesindonesia.co.id/read/135050/20161021/134456/lamongan-panen-roya-pepaya/>. (diakses pada 14 Juni 2017)

- Arfah, Hamzah. 2016. *Melalui Program “GEMERLAP” Pemerintah Ingin Kurangi Tingkat Kemiskinan.*  
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/10/11/173000326/melalui.program.gemerlap.lamongan.ingin.kurangi.tingkat.kemiskinan>.  
(diakses pada 14 Juni 2017)
- Hutomo, Mardi Yatmo. \_\_\_\_\_.  
[https://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/mardi\\_20091015151035\\_2384\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/mardi_20091015151035_2384_0.pdf).
- Nugroho. 2015. *Ternak Ayam GEMERLAP Raup Untung Rp 22 Juta.*  
<http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/ternak-ayam-gemerlap-raup-untung-rp-22-juta>. (diakses pada 14 Juni 2017)
- Savitri, Cintia dan Setiawan Adi wijayah. 2017. *Jumlah Penduduk Miskin Meningkat, Ini Penyebabnya.*  
<https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/07/17/090892039/jumlah-penduduk-miskin-meningkat-ini-penyebabnya>. (diakses pada 14 Juni 2017)
- [http://eprints.undip.ac.id/37089/2/5-Bab\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/37089/2/5-Bab_II.pdf). (diakses pada 14 Juni 2017)
- <https://golddluffy.wordpress.com/2009/10/25/rumusan-masalah-menurut-para-pakar/>. (diakses pada 14 Juni 2017)

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian**



Penerimaan pupuk oleh petani



Pohon Pepaya Calina yang baru tumbuh



Kondisi pepaya sebelum panen



Hasil Panen Kelompok Tani Holtikultura “Godong Ijo Sejahtera”



Kondisi pohon pepaya yang mulai terkena penyakit busuk batang



Hasil panen buah Pepaya Calina yang terkena busuk batang



Wawancara dengan Kepala Seksi  
Hortikultura dan AKB, Dinas Tanaman  
Pangan Hortikultura dan Perkebunan  
Lamongan



wawancara dengan ketua Kelompok  
Tani Holtikultura “Godong Ijo  
Sejahtera”



Wawancara dengan pak hartono selaku  
masyarakat desa Candisari



Buah pepaya yang siap dipasarkan  
dan dikirim ke CV Negeri Hijau  
Indonesia

Lampiran 2. Laporan Akhir

**LAPORAN AKHIR  
KEGIATAN PENGADAAN KAWASAN  
PEPAYA KALINA APBD II KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah saw, karena atas karunia Nya yang dilimpahkan sehingga Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan Pengembangankawasan papaya kalina diKecamatan Sambeng dan Kecamatan Ngimbang tahun 2017 ini bisa terlaksana. Kegiatan dari sumber dana APBD II Kabupaten Lamongan tahun 2017.

Dengan tersusunya laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan kawasan Pepaya Kalina tahun 2017 ini disampaikan terima kasih atas kerja keras dari semua pihak terkait, yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Diharapkan semoga para petani penerima fasilitasbantuansaranaproduksiini termotivasi untuk mengembangkan tanaman hortikultura (buah-buahan) sehingga akan memperluas kawasan sentra buah di Kabupaten Lamongan.

Dengan harapan semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan dampak positif serta penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan ini

Lamongan, Januari 2018

KEPALA DINAS  
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN  
PERKEBUNAN KABUPATEN LAMONGAN

Ir. ARIS SETIADI. MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19580808 198003 1 026

## DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar .....		i
Daftar Isi .....		ii
I	Pendahuluan .....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Tujuan dan Sasaran .....	1
II.	Mekanisme Perencanaan dan Pengorganisasian ..	2
	2.1. Perencanaan .....	2
	2.2. Pengorganisasian .....	2
III	Pelaksanaan Kegiatan .....	3
	A. Dasar Pelaksanaan .....	3
	B. Waktu dan Lokasi .....	3
	C. Pelaksanaan Dilapangan .....	3
IV	Indikator Keberhasilan .....	4
	a. Input .....	4
	b. Output .....	4
	c. Outcome .....	4
	d. Benefit .....	4
	e. Impact .....	4
V	Permasalahan Dan Upaya Pemecahannya .....	4
	5.1. Permasalahan .....	4
	5.2. Upaya Pemecahan Masalah .....	5
VI.	Penutup .....	5
	6.1. Kesimpulan .....	5
	6.2. Saran .....	6
	Lampiran – Lampiran .....	

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tanaman Buah adalah merupakan salah satu komoditi buah yang telah banyak dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar maupun kebutuhan konsumsi masyarakat di pedesaan. Buah Pepaya kalina ini banyak di sukai oleh masyarakat karena memiliki rasanya yang manis asam menyegarkan. Buah papaya kalina umumnya di makan dalam keadaan segar, atau disajikan sebagai buah meja. Disamping itu buah papaya kalina merupakan komoditas buah yang mempunyai potensi untuk di kembangkan pada skala komersial, mengingat komoditas tersebut mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan petani .

Ditinjau dari potensi lahan dan adanya kemauan petani yang sangat besar, maka masih sangat terbuka untuk meningkatkan pengembangan tanaman buah di lahan kering, tegal maupun lahan pekarangan. Salah satu kendala dalam peningkatan produksi buah adalah adanya fenomena anomali iklim yang bisa menyebabkan terjadinya timbulnya serangan OPT sehingga tanaman layu dan buah rontok /gagal panen. Sejalan dengan hal tersebut maka sangat perlu adanya dukungan maupun bantuan dari pihak Pemerintah terhadap tanaman papaya kalina kepada para petani di pedesaan

Dalam rangka untuk meningkatkan produksi tanaman buah-buahan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2017 telah berupaya dengan melakukan kegiatan pengembangan kawasan tanaman papaya kalina yang dibantukan kepada para petani. Diharapkan nantinya petani dapat mengembangkan terhadap tanaman papaya di Kabupaten Lamongan utamanya tanaman

papaya kalina sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

## 1.2. Tujuan dan Sasaran

### A. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan petani dalam menerapkan budidaya tanaman papaya kalina.
2. Memotivasi petani sekaligus menggerakkan upaya penyediaan buah- buahan secara swadaya
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas buah papaya kalina serta meningkatkan pendapatan petani

### B. Sasaran

1. Berkembangnya jumlah tanaman hortikultura di lingkungan/ lahan petani
2. Meningkatnya pengetahuan petanidalam menerapkanbudidaya tanaman buah / papaya kalina.
3. Termotifasinya petani dalam menggerakkan upaya penyediaan buah-buahan secara swadaya
4. Meningkatnya produktivitas dan produksi papaya kalina.

## II. MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN

### 2.1. Perencanaan

1. Penetapan lokasi penerima bantuan :
  - a. Penetapan lokasi berdasarkan potensi, kemampuan dan sasaran pengembangan kawasan papaya kalina
  - b. Lokasi penerima bantuan diutamakan pada lokasi yang potensi untuk ditanamitanamanbuah – buahan.
  - c. Lokasi penerima fasilitasbantuanpengembangan papaya kalinatahun 2017adalah : Kecamatan Sambengdan Kecamatan NgimbangKabupatenLamongan.
2. Kriteria kelompok penerima bantuan :

Kriteria kelompok tani penerima fasilitas bantuan sarana produksi adalah: pada kelompok tani yang bersedia untuk menanam bibit papaya kalin sesuai teknik anjuran yang di berikan.

### 3. Jenis bantuan yang di berikan :

Fasilitas bantuan sarana produksi yang di salurkan ke kelompok tani adalah berupa sarana produksi pupuk Organik, pupuk an organik, pestisida

### 2.2. Pengorganisasian

Agar pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan papaya kalina ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan, maka perlu pembinaan, pendampingan dan pengawalan oleh petugas teknis ( KUPT, PPL, Petugas POPT ).

Tugas pengawalan, pembinaan dan pendampingan tersebut meliputi :

1. Mengusulkan kelompok tani penerima bantuan bibit/ membuat CPCL
2. Melakukan pengawalan, pembinaan kepada kelompok tani
3. Mengawal kelompok tani dalam melaksanakan budidaya tanaman papaya kalina.

## III. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Dasar pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 2.01.03.01.28.002.5.2 Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

Pada Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan. Kegiatan Pengembangan kawasan papaya kalina.

### B. Waktu dan lokasi

1. Pelaksanaan kegiatan dilapangan dipersiapkan mulai bulan Januari, sampai dengan bulan Desember 2017.
2. Lokasi Pelaksanaan kegiatan ini berada di Kelompok tani Godong Hijau Sejahtera desa Candisari Kecamatan Sambeng

dan di kelompok tani Setia Kawan desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

C. Pelaksanaan dilapangan

- Lahan yang digunakan untuk tanaman papaya kalina adalah lahan tegal/ sawah tadah hujan.
- Fasilitas bantuan sarana produksi pupuk, pestisida dan lainnya di kirim sampai ke titik bagi/ kelompok tani.
- Sebelum bibit di tanam terlebih dahulu membuat lubang tanaman dengan ukuran panjang 50 cm, lebar 50 cm dan tinggi 50 cm,
- Tanah galian lubang tanaman bagian atas dan tanah galian bagian bawah harus terpisah dan tanah bagian atas diberi pupuk organik sebanyak 20 kg per lubang tanaman.
- Jarak tanam 3 meter x 3 meter atau disesuaikan dengan ketersediaan jumlah bibit
- Teknik penanaman : sebelum bibit di tanam terlebih dahulu polybag tempat media bibit harus dibuka dengan hati-hati jangan sampai tanahnya pecah
- Penanaman bibit harus ditengah-tengah lubang tanaman yang telah disiapkan dan lubang tanaman sudah diberi pupuk organik
- Penanaman bibit harus tegak lurus, agar tanaman tidak goyang maka perlu diberi ajir dari bambu/ kayu setinggi 1 m
- Bila tanahnya kering setelah tanam harus disiram secukupnya

IV. INDIKATOR KEBERHASILAN

a. Input

Tersedianya bantuan dana APBD II Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2017

b. Output

- Terealisasinya fasilitas bantuan saprodi pupuk KCl 7.000kg, pupuk organik 9.800 kg, pupuk organik cair 168 ltr, pestisida 14 ltr. di Desa Candisari Kecamatan Sambeng,

Keterangan	Jumlah
Pembelian Pupuk KCL @3.900 x 7000 kg	27.300.000
Pembelian Pupuk Organik @1.300 x 9800 kg	12.740.000
Pembelian Pupuk Organik Cair @30.000 x 168 lt	5.040.000
Pembelian Pestisida @105.000 x 14 lt	1.470.000

- Terealisasinya fasilitas bantuan saprodi pupuk KCl 1.500 Kg, pupuk organik 2.100 kg, pupuk organik cair 36 ltr, pestisida 3 ltr, di desa Durekedungjero Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

Keterangan	Jumlah
Pembelian Pupuk KCL @3.900 x 1500 kg	5.850.000
Pembelian Pupuk Organik @1.300 x 2100 kg	2.730.000
Pembelian Pupuk Organik Cair @30.000 x 36 lt	1.080.000
Pembelian Pestisida @105.000 x 3 lt	315.000

#### c. Outcome

- Terlaksananya pengembang kawasan papaya kalin seluas 14 ha di Kecamatan Sambeng
- Terlaksananya pengembang kawasan papaya kalin seluas 3 Ha di kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

#### d. Benefit

- Adanya penyediaan pangan ( buah- buahan )
- Peningkatan produksi hortikultura papaya kalina

#### e. Impact

- Perluasan areal tanaman hortikultura komoditas papaya kalina
- Mendukung hidup sehat dengan mengkonsumsi buah-buahan
- Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di pedesaan

## V. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

### 5.1. Permasalahan

- a. Minat petani untuk mengembangkan tanaman buah- buahan sangat besar, namun karena para petani pada umumnya masih keterbatasan masalah dana sehingga pengembangan tanaman hortikultura masih kecil
- b. Tingkat pengetahuan petani terhadap pelaksanaan teknologi budidaya tanaman buah-buahan masih terbatas/ kurang
- c. Akibat dari kurangnya para petani terhadap penanganan budidaya buah –buahan sehingga produksi maupun produktivitas buah masih belum optimal, bahkan belum bisa memenuhi sesuai keinginan pasar.

### 5.2. Upaya Pemecahan Masalah

- a. Perlu adanya dukungan dari semua pihak BUMN, BUMD, Pemerintah dan pihak swasta untuk mendukung pengembangan tanaman hortikultura di tingkat petani
- b. Meningkatkan pembinaan kepada para petani/ kelompok tani dalam penanganan teknologi budidaya tanaman buah- buahan yang baik
- c. Perlu adanya fasilitasi dan penanganan serius dari semua pihak ( Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta ) dalam rangka menghadapi persaingan pasar bebas terhadap produk buah- buahan.
- d. Perlu adanya kelanjutan pengembangan tanaman hortikultura dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas buah serta untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

## VI. PENUTUP

### 6.1. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman papaya kalin dari APBD II Kabupaten Lamongan tahun 2017 dapat terlaksana,

Pelaksanaankegiatan di lapangan dilaksanakan mulai bulanMaretsampaidenganbulanDesember 2017.

Lokasi kegiatan pengembangan tanaman papaya kalina di kelompok tani Godong Hijau Sejahtera desa Candisari Kecamatan Sambeng seluas 14 ha, kelompok tani Setia Kawan desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang seluas 3 ha.

Dengan kesimpulan bahwa :

- Dengan adanya fasilitas bantuan pengembangan papaya kalina ini para petaniberterima kasih kepada Pemerintah yang telah memberikan fasilitas bantuan.
- Dengan adanya kegiatan pengembangan tanaman Pepaya kalina di Kecamatan Sambeng dan Kecamatan Ngimbang ini, maka bisa menambah jumlah tanaman hortikultura serta dapat menambah wawasan para petani terhadap peningkatan produksi buah, yang diharapkan nantinya petani dapat memproduksi buah papaya kalina sesuai keinginan pasar sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di pedesaan.
- Realisasi tanam dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Kecamatan Sambeng14 ha, KecamatanNgimbang 3 ha, tanam dilaksanakan pada bulan Juni - Nopember 2017, tingkat pertumbuhan tanaman dari awal sampai tanaman di panen baik dan keadaan serangan OPT tidak ada atau tingkat serangan ringan,
- Realisasi panen mulai dilaksanakan pada bulan Nopember 2017 dengan interfal jarak panen  $\pm$  7 hari dengan perolehan produksi total dari17 ha tercapai 73,95 ton atau rata-rata provitas 43,5 kw/ha.

Bila harga pepaya kalina rata-rata Rp2.500 per kg, maka akan diperoleh nilai sebesar  $73.950 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.500 = \text{Rp } 184.875.000,-$  atau rata-rata per hektar diperoleh Rp 10.875.000 jika

dibandingkan dengan buah pepaya lokal dengan harga per kg Rp 1.500 dan harga pepaya kalina per kg Rp 2.500, maka ada peningkatan Rp 1.000 per kg = Rp 1.000 x provitas 4.350 kg = Rp 4.350.000 pendapatan petani per ha.

Dengan adanya bantuan ini bisa mendorong perekonomian di pedesaan, tumbuh dan berkembangnya sentra produk papaya kalinayang berkelanjutan. Serta adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di pedesaan.

## 6.2 SARAN

Demikian Laporan akhir kegiatan pengembanganpapaya kalina Tahun 2017 ini dibuat, dengan terlaksanaanya kegiatan ini tidak lain disampaikan terima kasih atas bimbingan dan kerja keras dari semua pihak terkait. Dengan harapan kegiatan seperti ini bisa terus dikembangkanpada tahun berikutnya, dengan tujuan antara lain adalah :

- Untuk menunjang program peningkatan produksi dan produktivitas papaya kalinabisa tercapai dan terwujud.
- Untuk membantu dan meringankan beban petani terhadap kebutuhan saprodi dalam penerapan teknologi budidaya papaya kalina.
- Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di pedesaan
- Mendorong kelangsungan berusaha bagi para kelompok/ petani untuk tetap meningkatkan aktifitasnya dalam mengembangkan teknologi tepat guna dan berkelanjutan.

LAMPIRAN 3. Juknis Pepaya Calina

**PETUNJUK TEKNIS  
PENGEMBANGAN TANAMAN PEPAYA  
KALINA  
APBD II**

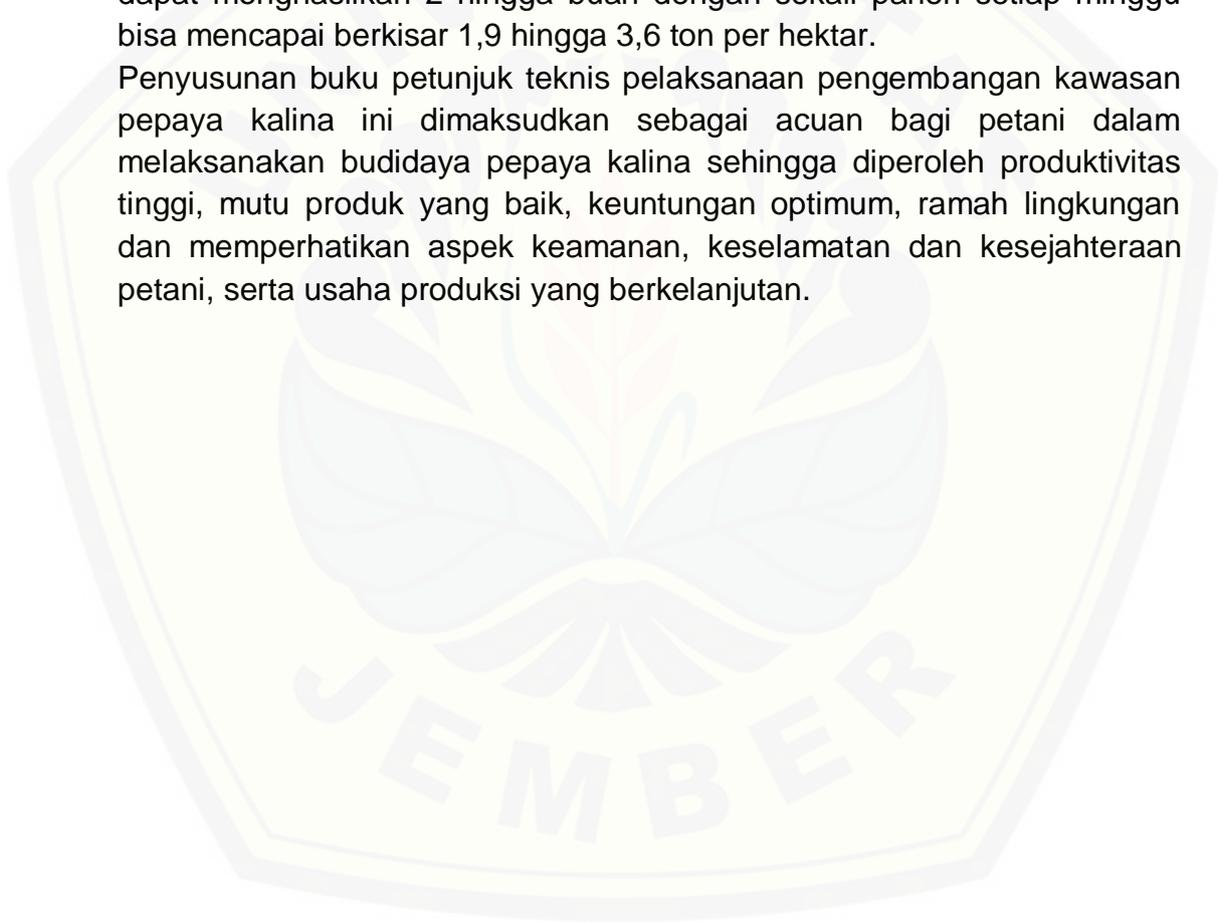


**KABUPATEN LAMONGAN  
2017**

## I. PENDAHULUAN

Tanaman Pepaya cukup banyak dikembangkan di negara-negara tropis termasuk di Indonesia. Tanaman ini mudah budah tumbuh dengan media tanah humus campur pasir, cukup sinar matahari dan drainase baik, tanaman pepaya dapat tumbuh subur. Varietas pepaya Kalina ini termasuk jenis unggul dan berumur genjah, pohon/batangnya lebih pendek dibanding jenis pepaya lain, tinggi tanaman sekitar 1,5 – 2 meter dan sudah bisa dipanen setelah berumur 8 – 9 bulan. Pohonnya dapat berbuah hingga umur mencapai empat tahun. Dalam satu bulan bisa dipanen sampai empat kali. Sekali panen setiap pohon pepaya Kalina dapat menghasilkan 2 hingga buah dengan sekali panen setiap minggu bisa mencapai berkisar 1,9 hingga 3,6 ton per hektar.

Penyusunan buku petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan kawasan pepaya kalina ini dimaksudkan sebagai acuan bagi petani dalam melaksanakan budidaya pepaya kalina sehingga diperoleh produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan optimum, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kesejahteraan petani, serta usaha produksi yang berkelanjutan.



## II. BUDIDAYA PEPAYA KALINA

### 1. Pembibitan

Caranya dengan memotong 1/3 bagian buah pangkal dan mengambil biji dari 2/3 buah di bagian ujung untuk dijadikan benih.

### 2. Persiapan dan Pengolahan Lahan

Lahan dibersihkan dari gulma dan sisa-sisa tanaman lain. Lakukan pengolahan tanah dengan mencangkul dan meratakan tanah kemudian. Selanjutnya buat lubang tanam dimana tanah bagian atas diletakkan di sisi kanan dan tanah bagian bawah pada sisi kiri. Pada saat penanaman, timbunan tanah bagian bawah digunakan untuk menimbun terlebih dahulu diikuti dengan timbunan tanah bagian atas. Lubang tanam dibiarkan dan diangin-anginkan selama  $\pm$  1 – 2 minggu untuk mengurangi kemasaman dan kandungan air. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 60 x 60 x 50 cm, jarak lubang disesuaikan dengan jarak tanam 2,5 x 2,5 m atau 2,5 x 2,75 m. Populasi tanaman per hektar 1.200 pohon.

### 3. Penanaman

Penanaman pepaya Kalina dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan benih yang langsung ditanam dan dengan menggunakan benih yang langsung ditanam dan dengan menggunakan bibit. Jika menggunakan benih langsung ditanam sebanyak 2 – 3 biji per lubang tanam. Apabila penanaman menggunakan bibit, maka dilakukan dengan memindahkan bibit dari polybag yang telah berumur antara 1 – 1,5 bulan ke lubang tanam yang telah disiapkan sebelumnya.

### 4. Pemupukan

Pupuk dasar yang digunakan adalah pupuk organik sebanyak 20 Kg per lubang tanam. Tanah diaduk dengan pupuk organik secara merata. Pupuk dasar ini diberikan 3 – 4 hari sebelum tanam. Pupuk susulan yang diberikan berupa pupuk NPK 15-15-15 sebanyak 100Kg/ha untuk satu musim tanam. Penambahan pupuk organik setiap 3 bulan sekali masing-masing sebanyak 20 Kg per tanaman.

### 5. Pemeliharaan

Penyiangan gulma, dilakukan sebelum pemberian pupuk susulan atau sesuai dengan kondisi gulma. Pembubunan dilakukan bersamaan dengan penyiangan gulma 20 Kg per tanaman.

### 6. Panen

Tanaman pepaya Kalina dapat dipanen pertama setelah berumur 8 – 9 bulan. Tanda-tanda kematangan, yaitu terdapat semburat warna kuning kemerahan 25% pada kulit buah.

**LAMPIRAN 4. PROFIL DESA**

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

**PENDUDUK DAN KEPALA KELUARGA**

<b>Jumlah</b>	<b>Laki – laki (Orang)</b>	<b>Perempuan (Orang)</b>
Jumlah penduduk tahun ini	1.675	1.644
Jumlah penduduk tahun lalu	1.773	1.727
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	927	62
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	937	52

EKONOMI MASYARAKAT

**PENGANGURAN**

<b>Kelompok Usia</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1.812
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	-
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	<b>331</b>
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	<b>1.481</b>
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	<b>331</b>
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	-
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	-

**KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Jumlah keluarga prasejahtera	306	KK
Jumlah keluarga sejahtera 1	243	KK
Jumlah keluarga sejahtera 2	271	KK
Jumlah keluarga sejahtera 3	162	KK
Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	8	KK
Total jumlah kepala keluarga	989	KK

PRODUK DOMESTIK DESA / KELURAHAN BRUTO

<b>SEKTOR PRODUK</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN</b>	
Total Nilai produksi tahun ini	Rp. -
Total Nilai bahan baku yang digunakan	Rp. -
Total Nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. -
Total Nilai biaya antara yang dihabiskan	Rp. -
Total Jenis bahan tambang dan galian yang ada	- Buah
<b>SUBSEKTOR KERAJINAN</b>	
Total Nilai produksi tahun ini	Rp. -

Total Nilai bahan baku yang digunakan	Rp. -
Total Nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. -
Total Nilai biaya antara yang dihabiskan	Rp. -
Total Jenis Kerajinan rumah tangga yang ada	- Buah
<b>SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	
<b>Industri Pengolahan Migas</b>	
Total Nilai produksi tahun ini	Rp. -
Total Nilai bahan baku yang digunakan	Rp. -
Total Nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. -
Total Nilai biaya antara yang dihabiskan	Rp. -
Total Jumlah Jenis Industri tsb yang ada	- Buah
<b>Industri Pengolahan Non Migas</b>	
Total Nilai produksi tahun ini	Rp. -
Total Nilai bahan baku yang digunakan	Rp. -
Total Nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. -
Total Nilai biaya antara yang dihabiskan	Rp. -
Total Jumlah Jenis Industri tsb yang ada	- Buah
<b>Subsektor Industri Pakaian</b>	
Total Nilai produksi tahun ini	Rp. -
Total Nilai bahan baku yang digunakan	Rp. -
Total Nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. -
Total Nilai biaya antara yang dihabiskan	Rp. -
Total Jumlah Jenis Industri tsb yang ada	- Buah
<b>Subsektor Industri Pangan</b>	
Total Nilai produksi tahun ini	Rp. -
Total Nilai bahan baku yang digunakan	Rp. -
Total Nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. -
Total Nilai biaya antara yang dihabiskan	Rp. -
Total Jumlah Jenis Industri tsb yang ada	- Buah
<b>SUBSEKTOR KEHUTANAN</b>	
Total Nilai produksi tahun ini	Rp. -
Total Nilai bahan baku yang digunakan	Rp. -
Total Nilai bahan penolong yang digunakan	Rp. -
Total Nilai biaya antara yang dihabiskan	Rp. -
<b>SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN</b>	
<b>Subsektor Perdagangan Besar</b> <span style="float: right;">Jenis</span>	
Total Jumlah Jenis perdagangan besar	Rp. -
Total Nilai Transaksi	Rp. -
Total Nilai Aset perdagangan yang ada	Rp. -
Total Nilai biaya yang dikeluarkan	Rp. -
Total Nilai biaya antara lain	Rp. -
<b>Subsektor perdagangan kecil</b>	
Total Jumlah Jenis perdagangan eceran	Jenis

Total Nilai Transaksi	Rp. -
Total Nilai biaya yang dikeluarkan	Rp. -
Total Nilai Aset perdagangan eceran	Rp. -
<b>Subsektor Hotel</b>	
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada	Jenis
Jumlah Total Pendapatan	Rp. -
Jumlah total biaya pemeliharaan	Rp. -
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp. -
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. -
<b>Subsektor Restoran</b>	
Jumlah tempat penyediaan konsumsi	Unit
Biaya konsumsi yang dikeluarkan	Rp. -
Biaya antara lainnya	Rp. -
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp. -
<b>SEKTOR BANGUNAN / KONSTRUKSI</b>	
Jumlah bangunan yang ada tahun ini	Unit
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	Rp. -
Total nilai bangunan yang ada	Rp. -
Biaya antara lainnya	Rp. -
<b>SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN</b>	
<b>Subsektor Bank</b>	
Jumlah transaksi perbankan	Rp. -
Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp. -
Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp. -
<b>Subsektor lembaga keuangan bukan bank</b>	
Jumlah lembaga keuangan bukan bank	Unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank	Jenis
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank	Rp. -
Biaya yang dikeluarkan	Rp. -
<b>Subsektor Sewa Bangunan</b>	
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah	Unit
Total nilai persewaan yang dicapai	Rp. -
Biaya yang dikeluarkan	Rp. -
Biaya lainnya	Rp. -
<b>Subsektor Jasa Perusahaan</b>	
Jumlah perusahaan jasa	Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp. -
Biaya yang dikeluarkan	Rp. -
Biaya lainnya	Rp. -
<b>SEKTOR JASA – JASA</b>	
<b>Subsektor jasa pemerintahan umum</b>	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada	Rp. -

masyarakat	
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. -
<b>Subsektor jasa swasta</b>	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	Jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. -
Biaya yang dikeluarkan	Rp. -
<b>Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi</b>	
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	Jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp. -
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. -
<b>Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga</b>	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan, rumah tangga	Jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp. -
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp. -
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. -
<b>SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>	
<b>Subsektor Angkutan</b>	
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan	Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan	Unit
Nilai total transaksi pengangkutan	Rp. -
Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp. -
<b>Subsektor jasa Penunjang angkutan</b>	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelabuhan, terminal, tambatan, agensi, ekspedisi, tol, bongkar muat dan parkir	Jenis
Jumlah total nilai transaksi jasa penunjang angkutan	Rp. -
Nilai biaya antara yang dikeluarkan	Rp. -
<b>Subsektor Komunikasi</b>	
Jumlah jenis kegiatan informasi dan telekomunikasi serta jasa penunjang lainnya	Jenis
Jumlah nilai aset telekomunikasi dan informasi yang ada	Rp. -
Nilai transaksi informasi dan telekomunikasi yang dicapai	Rp. -
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. -
<b>SEKTOR LISTRIK, GAS &amp; AIR MINUM</b>	
<b>Subsektor Listrik</b>	

Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik		Jenis
Jumlah nilai produksi listrik	Rp. -	
Jumlah total nilai transaksi	Rp. -	
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp. -	
<b>Subsektor Gas</b>		
Jumlah kegiatan penyediaan gas		Jenis
Nilai aset produksi gas	Rp. -	
Nilai transaksi	Rp. -	
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. -	
<b>Subsektor Air Minum</b>		
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum		Jenis
Nilai aset penyediaan air minum	Rp. -	
Nilai produksi air minum	Rp. -	
Nilai transaksi air minum	Rp. -	
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. -	
<b>NILAI TOTAL PENDAPATAN DOMESTIK DESA / KELURAHAN BRUTO DARI SEMUA SEKTOR (% total nilai produksi dan transaksi terhadap total biaya yang dikeluarkan dari semua sektor)</b>	Rp. -	

## PENDAPATAN PERKAPITA

### **MENURUT SEKTOR USAHA**

<b>PERTANIAN</b>		
1. Jumlah rumah tangga petani	959	KK
2. Jumlah total anggota rumah tangga petani	1.494	Orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	30	KK
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh petani	178	Orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertanian untuk setiap rumah tangga pertanian	Rp 750.000	
<b>PERKEBUNAN</b>		
1. Jumlah rumah tangga perkebunan	54	KK
2. Jumlah total anggota rumah tangga perkebunan	340	Orang
3. Jumlah rumah tangga buruh perkebunan	23	KK
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh perkebunan	42	Orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor perkebunan untuk setiap rumah tangga perkebunan	Rp 970.000	
<b>PETERNAKAN</b>		
1. Jumlah rumah tangga peternakan	3	KK
2. Jumlah total anggota rumah tangga peternakan	3	Orang
3. Jumlah rumah tangga buruh peternakan	-	KK
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh peternakan	-	Orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor peternakan untuk setiap rumah tangga peternakan	Rp 1.200.000	
<b>PERIKANAN</b>		
1. Jumlah rumah tangga perikanan		5 KK

2. Jumlah total anggota rumah tangga perikanan	5 Orang
3. Jumlah rumah tangga buruh perikanan	2 KK
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh perikanan	3 Orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan	Rp 1.500.000
<b>KERAJINAN</b>	
1. Jumlah rumah tangga pengrajin	- KK
2. Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin	- Orang
3. Jumlah rumah tangga buruh pengrajin	- KK
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin	- Orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin	Rp -
<b>PERTAMBANGAN</b>	
1. jumlah rumah tangga pertambangan	- KK
2. Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan	- Orang
3. Jumlah rumah tangga buruh pertambangan	- KK
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan	- Orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertambangan untuk setiap rumah tangga pertambangan	Rp -
<b>KEHUTANAN</b>	
1. Jumlah rumah tangga kehutanan	- KK
2. Jumlah total anggota rumah tangga kehutanan	- Orang
3. Jumlah rumah tangga buruh kehutanan	- KK
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh kehutanan	- Orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor kehutanan untuk setiap rumah tangga kehutanan	Rp -
<b>INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN BESAR</b>	
1. Jumlah rumah tangga perkebunan	KK
2. Jumlah total anggota rumah tangga perkebunan	Orang
3. Jumlah rumah tangga buruh industri	KK
4. Jumlah total anggota rumah tangga buruh industri	Orang
5. Jumlah pendapatan percapita dari sektor industri untuk setiap rumah tangga industri	Rp -
<b>JASA DAN PERDAGANGAN</b>	
1. Jumlah rumah tangga sektor jasa dan perdagangan	- KK
2. Jumlah total anggota rumah tangga jasa perdagangan	- Orang
3. Jumlah rumah tangga buruh jasa dan perdagangan	- KK
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh jasa dan perdagangan	- Orang
5. Jumlah pendapatan percapita dari sektor jasa dan perdagangan untuk setiap rumah tangga jasa dan perdagangan	Rp -

### **PENDAPATAN RIIL KELUARGA**

Jumlah Kepala Keluarga	989	KK
Jumlah Anggota Keluarga	3.500	Orang
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp 750.000,-	

Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 700.000,-
<b>Jumlah Total Pendapatan Keluarga</b>	Rp 350.000,-
<b>Pendapatan Anggota Keluarga</b>	Rp 755.000,-

## STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

<b>Sektor Pertanian</b>		
Petani	1.494	Orang
Buruh tani	178	Orang
Pemilik usaha pertanian	2	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>2.674</b>	<b>Orang</b>
<b>Sektor Perkebunan</b>		
Buruh perkebunan	340	Orang
Karyawan Perusahaan Perkebunan	-	Orang
Pemilik usaha Perkebunan	-	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>340</b>	<b>Orang</b>
<b>Sektor Peternakan</b>		
Buruh usaha peternakan	3	Orang
Pemilik usaha peternakan	3	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>Orang</b>
<b>Sektor Perikanan</b>		
Nelayan	-	Orang
Pemilik usaha perikanan	5	Orang
Buruh usaha perikanan	3	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>Orang</b>
<b>Sektor Kehutanan</b>		
Pemilik usaha pengolahan hasil hutan	-	Orang
Buruh usaha pengolahan hasil hutan	-	Orang
Pengumpul hasil hutan	-	Orang
<b>Jumlah</b>		Orang
<b>Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C</b>		
Penambang galian C kerakyatan/perorangan	-	Orang
Pemilik usaha pertambangan skala kecil dan besar	-	Orang
Buruh usaha pertambangan	-	Orang
<b>Jumlah</b>		Orang
<b>Sektor Industri Kecil &amp; Kerajinan Rumah Tangga</b>		
Montir	-	Orang
Tukang batu	14	Orang

Tukang kayu	19	Orang
Tukang sumur	2	Orang
Pemulung	2	Orang
Tukang jahit	4	Orang
Tukang kue	1	Orang
Tukang anyaman	47	Orang
Tukang rias	1	Orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	-	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>Orang</b>
<b>Sektor Industri Menengah dan Besar</b>		
Karyawan perusahaan swasta	-	Orang
Karyawan perusahaan pemerintah	-	Orang
Pemilik perusahaan	-	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>Orang</b>
<b>Sektor Perdagangan</b>		
Pengusaha perdagangan hasil bumi	-	Orang
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	-	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>Orang</b>
<b>Sektor Jasa</b>		
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	-	Orang
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	-	Orang
Pemilik usaha informasi dan komunikasi	-	Orang
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	-	Orang
Kontraktor	-	Orang
Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	-	Orang
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	-	Orang
Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya	-	Orang
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	-	Orang
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	-	Orang
Pegawai Negeri Sipil	21	Orang
TNI	1	Orang
POLRI	2	Orang
Dokter swasta	-	Orang
Bidan swasta	-	Orang
Perawat swasta	-	Orang
Dukun/paranormal/supranatural	1	Orang
Jasa pengobatan alternatif	-	Orang
Dosen swasta	-	Orang
Guru swasta	-	Orang
Pensiunan TNI/POLRI	-	Orang
Pensiunan PNS	5	Orang
Pensiunan swasta	-	Orang
Pengacara	-	Orang
Notaris	-	Orang
Jasa Konsultansi Manajemen dan Teknis	-	Orang
Seniman/artis	-	Orang

Pembantu rumah tangga	-	Orang
Sopir	28	Orang
Buruh migran perempuan	-	Orang
Buruh migran laki-laki	-	Orang
Usaha jasa pengerah tenaga kerja	-	Orang
Wiraswasta lainnya	-	Orang
Tidak mempunyai matapencaharian tetap		Orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	-	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>3.115</b>	<b>Orang</b>

## PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

<b>ASET TANAH</b>		
Tidak memiliki tanah	57	Orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha	211	Orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	94	Orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	97	Orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	114	Orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	156	Orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	87	Orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	34	Orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	5	Orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	7	Orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha	15	Orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha	1	Orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha	-	Orang
<b>Jumlah total penduduk</b>	<b>3.500</b>	<b>Orang</b>
<b>SARANA TRANSPORTASI UMUM</b>		
	<b>JUMLAH PEMILIK</b>	<b>JUMLAH ASET</b>
Memiliki ojek	- Orang	- Unit
Memiliki becak	- Orang	- Unit
Meimiliki cidemo/andong/dokar	- Orang	- Unit
Memiliki kapal motor	- Orang	- Unit
Memiliki bus	- Orang	- Unit
Memiliki mini bus	- Orang	- Unit
Memiliki helikopter dan atau pesawat	-	- Unit

	Orang	
<b>Jumlah</b>	<b>Orang</b>	Unit
<b>SARANA PRODUKSI</b>		
Memiliki penggilingan padi	3	Orang
Memiliki traktor	26	Orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	-	Orang
Memiliki kapal penangkap ikan	-	Orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	-	Orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	-	Orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	1	Orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	-	Orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan	-	Orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata	-	Orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan	-	Orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil Industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	6	Orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas	-	Orang
<b>ASET PERUMAHAN</b>		
<b>RUMAH MENURUT DINDING</b>		
Tembok	503	Rumah
Kayu	439	Rumah
Bambu	-	Rumah
Tanah liat	-	Rumah
Pelepah kelapa/lontar/gebang	-	Rumah
Dedaunan	-	Rumah
<b>RUMAH MENURUT LANTAI</b>		
Keramik	427	Rumah
Semen	247	Rumah
Kayu	-	Rumah
Tanah	321	Rumah
<b>RUMAH MENURUT ATAP</b>		
Genteng	989	Rumah
Seng	-	Rumah
Asbes	-	Rumah
Beton	-	Rumah
Bambu	-	Rumah
Kayu	-	Rumah
Daun lontar/gebang/enau	-	Rumah
Daun ilalang	-	Rumah

## PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA

Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya	812	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya	892	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya	12	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perahu bermotor	-	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki kapal barang	-	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki kapal penumpang	-	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki kapal pesiar	-	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki helikopter	-	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki pesawat terbang	-	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak besar	-	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak kecil	-	Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki hiasan emas/berlian	-	Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank	-	Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki buku surat berharga	-	Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat deposito	-	Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah	63	Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat bangunan	21	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri besar	-	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri menengah	-	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri kecil	1	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan	5	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha peternakan	2	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha perkebunan	340	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha pasar swalayan	3	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar swalayan	4	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional	5	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar desa	6	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi/pengangkutan	7	Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki aset telekomunikasi	8	Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki saham di perusahaan	9	Keluarga
<b>Jumlah Keluarga seluruhnya</b>	<b>2.183</b>	<b>Keluarga</b>

## PENDIDIKAN MASYARAKAT

<b>TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>		
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	10	Orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	184	Orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	23	Orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	208	Orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	1.393	Orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	506	Orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	106	Orang

Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	891	Orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	150	Orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	68	Orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	362	Orang
Jumlah penduduk sedang D-1	11	Orang
Jumlah penduduk tamat D-1	3	Orang
Jumlah penduduk sedang D-2	1	Orang
Jumlah penduduk tamat D-2	1	Orang
Jumlah penduduk sedang D-3	11	Orang
Jumlah penduduk tamat D-3	22	Orang
Jumlah penduduk sedang S-1	23	Orang
Jumlah penduduk tamat S-1	51	Orang
Jumlah penduduk sedang S-2	10	Orang
Jumlah penduduk tamat S-2	8	Orang
Jumlah penduduk tamat S-3	0	Orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	0	Orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	0	Orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	0	Orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0	Orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0	Orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	0	Orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	23	Orang
% Penduduk buta huruf [(1): jumlah penduduk] x 100%	0.00003	%
% Penduduk tamat SLTP/ sederajat [(3): jumlah penduduk] x 100%	0,00225	%
<b>WAJIB BELAJAR 9 TAHUN</b>		
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	340	Orang
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	284	Orang
Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	56	Orang
		Orang
<b>RASIO GURU DAN MURID</b>		
		Orang
1. Jumlah Guru TK dan kelompok bermain anak	12	Orang
2. Jumlah Siswa TK dan kelompok bermain anak	184	Orang
3. Jumlah Guru SD dan sederajat	21	Orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	102	Orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	12	Orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	106	Orang
7. Jumlah Guru SLTA/ sederajat	0	Orang
8. Jumlah siswa SLTA/ sederajat	150	Orang
9. Jumlah siswa SLB	0	Orang
10. Jumlah guru SLB	0	Orang
<b>KELEMBAGAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>		
Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan	1	Unit
Jumlah taman bacaan desa/ kelurahan	1	Unit
Jumlah perpustakaan keliling	0	Unit
Jumlah sanggar belajar	0	Unit

Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	0 Kegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket A	0 Kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A	0 Orang
Jumlah kelompok belajar Paket B	0Kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B	0 Orang
Jumlah kelompok belajar Paket C	Kelompok
Jumlah peserta ujian Paket C	0 Orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan	0 Unit
Jumlah peserta kursus keterampilan	0 Orang

## KESEHATAN MASYARAKAT

<b>KUALITAS IBU HAMIL</b>	
Jumlah ibu hamil	26 Orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	10 Orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	11 Orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	5 Orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	5 Orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	16 Orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	0 Orang
Jumlah kematian ibu hamil	0 Orang
Jumlah ibu hamil melahirkan	14 Orang
Jumlah ibu nifas	0 Orang
Jumlah kematian ibu nifas	0 Orang
Jumlah ibu nifas hidup	0 Orang
<b>KUALITAS BAYI</b>	
Jumlah keguguran kandungan	2 Orang
Jumlah bayi lahir	22 Orang
Jumlah bayi lahir mati	0 Orang
Jumlah bayi lahir hidup	22 Orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	0 Orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 Orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	0 Orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	0 Orang
<b>KUALITAS PERSALINAN</b>	
<b>TEMPAT PERSALINAN</b>	
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	5 Unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	5 Unit
Tempat persalinan Puskesmas	0 Unit
Tempat persalinan Polindes	0 Unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 Unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan	17 Unit
Tempat praktek dokter	0 Unit
Rumah dukun	0 Unit
Rumah sendiri	0 Unit

<b>PERTOLONGAN PERSALINAN</b>		
Jumlah Persalinan ditolong Dokter		5 Tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan		17 Tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat		0 Tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin		0 Tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga		0 Tindakan
<b>CAKUPAN IMUNISASI</b>		
Jumlah Bayi usia 2 bulan		22 Orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1		3 Orang
Jumlah bayi usia 3 bulan		5 Orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2		5 Orang
Jumlah bayi usia 4 bulan		4 Orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3		4 Orang
Jumlah bayi 9 bulan		5 Orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak		5 Orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar		13 Orang
<b>PASANGAN USIA SUBUR DAN KB</b>		
<b>Pasangan Usia Subur</b>		
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun		259 Orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun		744 Orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun		2 Orang
Jumlah pasangan usia subur		744 Pasangan
<b>Keluarga Berencana</b>		
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik		561 Orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral		11 Orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom		0 Orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil		85 Orang
Jumlah pengguna metode vasektomi		0 Orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi		0 Orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah		0 Orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional		0 Orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode lainnya		0 Orang
<b>Jumlah Akseptor KB</b>		<b>657 Orang</b>
<b>Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB</b>		<b>87 Orang</b>
<b>WABAH PENYAKIT</b>		
<b>Jenis Wabah</b>	<b>Jumlah Kejadian Tahun ini</b>	<b>Jumlah Meninggal ( Orang )</b>
Muntaber	-	-
Demam Berdarah	-	-
Kolera	-	-
Polio	-	-
Cikungunya	-	-

Flu Burung	-	-
Busung lapar	-	-
Kelaparan	-	-
<b>ANGKA HARAPAN HIDUP</b>		
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan		Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota		Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi		Tahun
Angka harapan Hidup Nasional		Tahun
<b>CAKUPAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH</b>		
Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	567	Keluarga
Jumlah keluarga pelanggan PAM	0	Keluarga
Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	0	Keluarga
Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	625	Keluarga
Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	175	Keluarga
Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	0	Keluarga
Jumlah keluarga menggunakan air sungai	0	Keluarga
Jumlah keluarga menggunakan embung	0	Keluarga
Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	1	Keluarga
Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut	0	Keluarga
Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas		Keluarga
<b>Total Jumlah Keluarga</b>		<b>Keluarga</b>
<b>PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT</b>		
<b>KEBIASAAN BUANG AIR BESAR</b>		
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	271	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	321	Keluarga
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	6	Keluarga
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	32	Keluarga
<b>POLA MAKAN</b>	0	Keluarga
Kebiasaan penduduk makan dalam sehari 1 kali	<del>Ada</del> / Tidak Ada	
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	<del>Ada</del> / Tidak Ada	
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	Ada / <del>Tidak Ada</del>	
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali	Ada / <del>Tidak Ada</del>	
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali	<del>Ada</del> / Tidak Ada	
<b>KEBIASAAN BEROBAT BILA SAKIT</b>		
Dukun Terlatih		<del>Tidak ada</del> /Sedikit/Banyak
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu		<del>Tidak ada</del> /Sedikit/Banyak
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif		<del>Tidak ada</del> /Sedikit/Banyak
Paranormal		<del>Tidak ada</del> /Sedikit/Banyak
Obat tradisional dari keluarga sendiri		<del>Tidak ada</del> /Sedikit/Banyak

Tidak diobati	Tidak ada/Sedikit/Banyak	
<b>SATATUS GIZI BALITA</b>		
Jumlah Balita bergizi buruk	0	Orang
Jumlah Balita bergizi baik	134	Orang
Jumlah Balita bergizi kurang	1	Orang
Jumlah Balita bergizi lebih	6	Orang
<b>Jumlah Balita</b>	<b>141</b>	<b>Orang</b>
<b>PENDERITA SAKIT</b>		
<b>Jenis Penyakit</b>	<b>Jumlah Penderita</b>	<b>Tempat Perawatan</b>
Jantung	7 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
Lever	8 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
Paru-paru	9 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
Kanker	10 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
Stroke	11 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
Diabetes Melitus	12 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
Ginjal	13 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
Malaria	14 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
Lepra/Kusta	0 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
HIV/AIDS	0 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
Gila/stress	4 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
TBC	6 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
ISPA	0 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
Asma	6 Orang	Rumah/RS/Puskesmas
<b>PERKEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		
Jumlah MCK Umum	1	Unit
Jumlah Posyandu	6	Unit
Jumlah kader Posyandu aktif	6	Orang
Jumlah pembina Posyandu	1	Orang
Jumlah Dasawisma	24	Dasawisma
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	24	Orang
Jumlah kader bina keluarga balita aktif	6	Orang
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	6	Orang
Buku rencana kegiatan Posyandu	Diisi/Tidak diisi	
Buku data pengunjung Posyandu	Diisi/Tidak diisi	
Buku kegiatan pelayanan Posyandu	Diisi/Tidak diisi	
Buku administrasi Posyandu lainnya	3	Jenis
Jumlah kegiatan Posyandu	6	Jenis
Jumlah kader kesehatan lainnya	6	Orang
Jumlah kegiatan pengobatan gratis	-	Jenis
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	-	Jenis
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	6	Jenis

<b>KONFLIK SARAH</b>	0 Kasus
Kasus konflik pada tahun ini	0 Kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini	0 Kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga	0 Kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW	0 Kasus
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	0 Kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain	0 Kasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 Kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	Rp -
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 Orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 Orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 Orang
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	0 Orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 Orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 Orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp -
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 Buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 Rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara	0 Orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara	0 Orang
Jumlah janda akibat konflik Sara	0 Orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara	0 Orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 Orang
<b>PERKELAHIAN</b>	
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	0 Kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	0 Kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	0 Kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	0 Kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 Kasus
<b>PENCURIAN</b>	
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini	0 Kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 Kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk	0 Kasus

Desa/Kelurahan setempat	
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	0 Kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 Orang
<b>PENJARAHAN DAN PENYEROBOTAN TANAH</b>	
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	0 Kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat	0 Kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat	0 Kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 Orang
<b>PERJUDIAN, PENIPUAN DAN PENGGELAPAN</b>	
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	0 Orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	0 Orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	0 Orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	0 Orang
<b>PEMAKAIAN MIRAS DAN NARKOBA</b>	
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	0 Buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	0 Orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras	0 Kasus
Jumlah pengedar Narkoba	0 Orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	0 Orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	0 Kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 Kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 Orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	0 Orang
<b>PROSTITUSI</b>	
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	0 Orang
Lokalisasi prostitusi	<del>Ada</del> Tidak Ada
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	0 Buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 Kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 Kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 Kali
<b>PEMBUNUHAN</b>	
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	0 Orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 Kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 Kasus
Jumlah kasus bunuh diri	0 Kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	0 Kasus

<b>PENCULIKAN</b>	
Jumlah kasus penculikan	I. Kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 Kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	0 Kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	0 Kasus
	0 Kasus
<b>KEJAHATAN SEKSUAL</b>	0 Kasus
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	0 Kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	0 Kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	0 Kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	0 Kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	0 Unit
<b>MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	
Jumlah gelandangan	0 Orang
Jumlah pengemis jalanan	0 Orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	0 Orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	0 Orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	4 Orang
Jumlah orang cacat fisik	0 Orang
Jumlah orang kelainan kulit	0 Orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	0 Orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	0 Orang
Jumlah panti jompo	0 Orang
Jumlah panti asuhan anak	0 Orang
Jumlah rumah singgah anak jalanan	0 Orang
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	0 Orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	0 Orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	0 Orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	0 Orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	0 Orang
Jumlah anak yatim usia 0 – 18 tahun	3 Orang
Jumlah anak piatu 0 – 18 tahun	0 Orang
Jumlah anak yatim piatu 0 – 18 tahun	0 Orang
Jumlah janda	65 Orang
Jumlah duda	47 Orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	0 Orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat	0 Orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat	0 Orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat	0 Orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	0 Orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	0 Orang

Jumlah penduduk eks NAPI	0 Orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	0 Orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 Orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	0 Orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	0 Orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	0 Orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan	0 Orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	0 Orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	0 Orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	0 Orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	0 Orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	0 Orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	0 Orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk	0 Orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	0 Orang
<b>KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b>	
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	0 Kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	0 Kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	0 Kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	0 Kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	0 Kasus
	0 Kasus
<b>TEROR DAN INTIMIDASI</b>	0 Kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan	0 Kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan	0 Kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk	0 Kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	0 Kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	0 Kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal	0 Kasus
<b>PELEMBAGAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN SEMESTA</b>	
Organisasi Siskamling	Ada / Tidak Ada

Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat	Ada / <del>Tidak Ada</del>
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda	23 RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas	720 Orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda	Ada / <del>Tidak Ada</del>
Buku anggota Hansip dan Linmas	2 Jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta	1 Unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah	1 Kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	6 Pos

## KEDAULATAN POLITIK MASYARKAT

<b>KESADARAN BERPEMERINTAH, BERBANGSA DAN BERNEGARA</b>	
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	0 Jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	0 Kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	0 Jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	0 Kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	Jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	0 Kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri	0 Kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi	0 Orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	0 Orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	0 Kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	0 Kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	0 Kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	0 Kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	0 Kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	0 Kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	0 Kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	0 Kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang	0 Kasus

dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	0 Kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 Kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	
<b>KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI</b>	
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	1 Jenis
Jumlah Wajib Pajak	3.115 Orang
Target PBB	<b>RP. 35678721,-</b>
Realisasi PBB	100 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	0 Tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	0 Jenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 Orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	Rp.0,-
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan	0 Jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	Rp.0
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	%
Jumlah kasus pungutan liar	0 Kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	0 Kasus
<b>PARTISIPASI POLITIK</b>	
<b>JUMLAH PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM</b>	
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	2.768 Orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	2.625 Orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	0 Orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini	5 Orang
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	3 Orang
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	9 Orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	0 Orang

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	2.740 Pemilih
<b>PEMILIHAN KEPALA DAERAH</b>	
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	2.740 Orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	2.620 Pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu	2.674 Pemilih
<b>PENENTUAN KEPALA DESA / LURAH DAN PERANGKAT DESA / KELURAHAN</b>	
<b>Penentuan Jabatan Kepala Desa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipilih Masyarakat secara langsung</li> <li>2. <del>Dipilih oleh perwakilan masyarakat</del></li> <li>3. <del>Ditunjuk Pemerintah Tingkat Atas</del></li> <li>4. <del>Diangkat turun temurun oleh masyarakat setempat</del></li> </ol>
<b>Penentuan Sekretaris Desa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota</li> <li>2. <del>Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota</del></li> <li>3. <del>Diusulkan oleh Kepala Desa, Dipilih, Diangkat dan Ditetapkan oleh Bupati/Walikota</del></li> </ol>
<b>Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta disahkan Camat</del></li> <li>2. <del>Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat</del></li> <li>3. <del>Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Camat/Kepala Distrik/Sebutan lain</del></li> </ol>
<b>Masa jabatan Kepala Desa</b>	Tahun
<b>Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>Ditunjuk dan diangkat oleh Camat sesuai Delegasi Kewenangan dari Bupati/Walikota</del></li> <li>2. Ditunjuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota secara langsung</li> </ol>
<b>PEMILIHAN BPD</b>	
Jumlah anggota BPD	11 Orang
Penentuan anggota BPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipilih masyarakat secara langsung</li> <li>2. <del>Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat</del></li> <li>3. <del>Ditunjuk oleh Kepala Desa/Camat dan unsur lanilla</del></li> <li>4. <del>Disahkan melalui keputusan Bupati/Walikota</del></li> </ol>
Pimpinan BPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung</li> <li>2. <del>Dipilih oleh Kepala Desa dan setuju Camat</del></li> <li>3. <del>Ditunjuk Camat</del></li> </ol>

	4. <del>Dipilih oleh rakyat secara langsung dari para anggota BPD</del>
Pemilikan kantor/ruang kerja	Ada/ <del>tidak</del>
Anggaran untuk BPD	Ada/ <del>tidak</del>
Produk keputusan BPD tahun ini	1. Peraturan Desa
	2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa .... kali
	3. Rancangan Peraturan Desa. .... buah
	4. Menyalurkan aspirasi masyarakat .....kali
	5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa..... kali
	6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa ..... kali
	7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa. ..... kali
<b>PEMILIHAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>	
Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Ada/ <del>tidak</del>
Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	1. Perdes
	2. Keputusan Kepala Desa
	3. <del>Keputusan Camat</del>
	4. <del>Belum diatur</del>
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	. 8 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	1. Keputusan Lurah
	2. <del>Keputusan Camat</del>
	3. <del>Belum diatur</del>
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	1 unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	1. <del>Dipilih oleh rakyat secara langsung</del>
	2. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah
	3. <del>Ditunjuk dan Diangkat oleh Camat</del>
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	1. <del>Dipilih oleh rakyat secara langsung</del>
	2. Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua LKD/LKK
	3. <del>Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah</del>
	4. <del>Ditunjuk dan Diangkat oleh Camat</del>
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban	Aktif/ <del>tidak</del>

LKD/LKK	
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	6 kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	Aktif / <del>tidak</del>
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	6 kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Ada/ <del>tidak</del>
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	Ada/ <del>tidak</del>
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	Ada/ <del>tidak</del>
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	Memadai/kurang memadai
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	60 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	1. Ada dan terisi
	2. <del>Tidak ada atau belum terisi semuanya</del>
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	Berfungsi/ <del>tidak</del>

## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

<b>MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN ( MUSRENBANGDES/KEL)</b>	
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	9 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	76 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	95 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	56 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	100 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan forum Musrenbang Partisipatif	Ya/ <del>tidak</del>
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	Ya/ <del>tidak</del>
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya/ <del>tidak</del>
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	65 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi	

Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa	60 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	100 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	0 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	Ada/tidak
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada/tidak
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada/tidak
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah kabupaten/Kota dan provinsi	6 kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	4 kegiatan
<b>PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN DAN PELESTARIAN HASIL PEMBANGUNAN</b>	
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang	80 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota	85 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa	6 kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	6 kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	0 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	65 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	75 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	65 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan	Ada/tidak

yang sudah ada	
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.	<del>Ada</del> /tidak
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	0 Kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	0 Kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	0 Kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	3 Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	7 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	7 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	2 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	1 kegiatan
<b>SEMANGANT KEGOTONGROYONGAN PENDUDUK</b>	
Jumlah kelompok arisan	7 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	0 orang
Ada tidaknya dana sehat	<del>Ada</del> /tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	<del>Ada</del> /tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	<del>Ada</del> /tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	<del>Ada</del> /tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	<del>Ada</del> /tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	<del>Ada</del> /tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	<del>Ada</del> /tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	<del>Ada</del> /tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	<del>Ada</del> /tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	<del>Ada</del> /tidak

Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	<del>Ada</del> /tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	Ada/ <del>tidak</del>
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	<del>Ada</del> /tidak
Ada tidaknya kerjasama antar Desa/Kelurahan	Ada/ <del>tidak</del>
Ada tidaknya penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan	Ada/ <del>tidak</del>
Ada tidaknya kegiatan gotong royong dalam penyelesaian konflik di setiap desa/kelurahan oleh masyarakat sendiri	<del>Ada</del> /tidak
Ada tidaknya gotong royong dalam menolong keluarga tidak mampu dan fakir miskin di desa dan kelurahan	Ada/ <del>tidak</del>
Ada tidaknya kegiatan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa	<del>Ada</del> /tidak
Kegiatan gotong royong dalam penanggulangan bencana	Ada/ <del>tidak</del>
Kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong	Ada/ <del>tidak</del>
<b>ADAT ISTIADAT</b>	
Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif/ <del>tidak</del> / <del>pernah ada</del>
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif/ <del>tidak</del> / <del>pernah ada</del>
Adat istiadat dalam upacara kematian	Aktif/ <del>tidak</del> / <del>pernah ada</del>
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Aktif/ <del>tidak</del> / <del>pernah ada</del>
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Aktif/ <del>tidak</del> / <del>pernah ada</del>
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	Aktif/ <del>tidak</del> / <del>pernah ada</del>
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Aktif/ <del>tidak</del> / <del>pernah ada</del>
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Aktif/ <del>tidak</del> / <del>pernah ada</del>
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Aktif/ <del>tidak</del> / <del>pernah ada</del>
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinan bagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	Aktif/ <del>tidak</del> / <del>pernah ada</del>
<b>SIKAP DAN MENTAL MASYARAKAT</b>	
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	0 jenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	0 jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	Ada/ <del>tidak</del>
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	Ada/ <del>tidak</del>
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	Ya/ <del>tidak</del>
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	1 jenis
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	0 jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.	0 kasus

Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	Ya/ <del>tidak</del>
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	Ya/ <del>tidak</del>
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	<del>Ya</del> /tidak
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	<del>Ya</del> /tidak
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain	<del>Ya</del> /tidak
<b>Etos Kerja Penduduk</b>	
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	Ya/ <del>tidak</del>
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasar	<del>Ya</del> /tidak
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	Ya/ <del>tidak</del>
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	Ya/ <del>tidak</del>
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	Tinggi/rendah
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	Tinggi/rendah
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	Ya/ <del>tidak</del>
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	Ya/ <del>tidak</del>
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	Tinggi/sedang
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan	Tinggi/sedang/rendah
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen	Tinggi/sedang/rendah
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	Tinggi/sedang/rendah
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	Tinggi/sedang/rendah
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang	Sering/jarang

menyesatkan	
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	Tinggi/ sedang/ rendah
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	Ya/ tidak
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	Tinggi/ sedang/ rendah

## LEMBAGA KEMASYARAKATAN

<b>A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN</b>	
Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LKK	Ada/ <del>tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Jumlah kegiatan	3 Jenis
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	3 jenis- Terisi/ <del>tidak</del>
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	5 Organisasi
<b>B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>	
<b>1. LKMD/LPM ATAU SEBUTAN LAIN</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	3 Jenis
Jumlah kegiatan	3 Jenis
<b>2. PKK</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	13 Jenis
Jumlah kegiatan	5 Jenis
Kelengkapan organisasi Dasawisma	Lengkap/ <del>tidak</del>
Kelengkapan organisasi Pokja	Lengkap/ <del>tidak</del>
<b>3. Karang Taruna</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
<b>4. RT</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	5 Jenis
Jumlah kegiatan	3 Jenis
<b>5. RW</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah Kegiatan	0 Jenis
<b>6. Lembaga adat</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah Kegiatan	0 Jenis
<b>7. BUMDES</b>	Ada/ <del>Tidak</del>

Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	9 Jenis
Jumlah Kegiatan	3 Jenis
<b>8. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
<b>9. Posyandu</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	3 Jenis
Jumlah kegiatan	3 Jenis
<b>10. Kelompok Tani/Nelayan</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	3 Jenis
Jumlah kegiatan	2 Jenis
<b>11. Organisasi Perempuan</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	9 Jenis
Jumlah kegiatan	1 Jenis
<b>12. Organisasi Pemuda</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	1 Jenis
Jumlah kegiatan	2 Jenis
<b>13. Organisasi profesi</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
<b>14. Organisasi Bapak</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
<b>15. Kelompok Gotong Royong</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	0 Jenis
Jumlah kegiatan	0 Jenis
<b>16. Posyantekdes</b>	Ada/ <del>tidak</del> Aktif/ <del>tidak</del>
<b>17. Organisasi Keagamaan</b>	Ada/ <del>tidak</del> - Aktif/ <del>tidak</del>
Jumlah kegiatan	1 Jenis
<b>18. ....</b>	Ada/ <del>Tidak</del>
Kepengurusan	Aktif/ <del>tidak</del>
Buku administrasi	.....Jenis
Jumlah kegiatan	.....Jenis
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Peraturan Desa/ <del>tidak</del>
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan	Peraturan Daerah/ <del>tidak</del>

Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	Peraturan Desa/ Peraturan Daerah
--	-------------------------------------

## PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

<b>APBDes DAN ANGGARAN KELURAHAN</b>	
Jumlah anggaran belanja & penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	<b>Rp 897.324.300</b>
<b>Sumber Anggaran</b>	Rp
APBD Kabupaten/Kota	Rp 353.372.000
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 94.347.500
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 303.004.800
Pendapatan Asli Desa	Rp 48.450.000
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 55.500.000
Alokasi Dana Desa	Rp 353.372.000
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 0
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat	Rp 2.650.000
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp 533.383.340
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 216.870.000
<b>PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA/LURAH</b>	
Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa kepada BPD	Ada/ <del>tidak</del>
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat	1 jenis
Status laporan keterangan pertanggung jawaban kepala Desa	Diterima/ <del>ditolak</del>
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	Diterima/ <del>direvisi</del>
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	0 jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	0 kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah	0 kasus
<b>PRASARANA DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN</b>	
Gedung Kantor	Ada/ <del>tidak</del> Kondisi baik/ <del>rusak</del>
Jumlah ruang kerja	5 Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	Ada/ <del>tidak</del> Kondisi

	<del>baik/rusak</del>
Listrik	Ada/ <del>tidak</del>
Air bersih	Ada/ <del>tidak</del>
Telepon	Ada/ <del>tidak</del>
<b>1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>	
Jumlah mesin tik	1 buah
Jumlah meja	10 buah
Jumlah kursi	75 buah
Jumlah almari arsip	3 buah
Komputer	2 unit
Mesin fax	2 unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	1 unit
Buku Data Perangkat Desa/Kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Perangkat Desa/Kelurahan	Lengkap/ <del>tidak</del>
Buku Peta Wilayah Desa/Kelurahan	Ada/ <del>tidak</del>
Struktur organisasi	Ada/ <del>tidak</del>
Kartu uraian tugas	Ada/ <del>tidak</del>
<b>1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	
Buku profil desa/kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> Diolah/ <del>tidak</del>
Buku data Peraturan Desa /Peraturan Daerah	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku administrasi kependudukan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku data inventaris	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku data aparat	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku administrasi pajak dan retribusi	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku data tanah	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku laporan pengaduan masyarakat	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku agenda ekspedisi	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku profil desa/kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku data induk penduduk	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku buku data mutasi penduduk	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>

Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku registrasi pelayanan penduduk	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku data penduduk sementara	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku anggaran penerimaan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku kas umum	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku kas pembantu penerimaan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku data lembaga kemasyarakatan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku data pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku data program dan kegiatan masuk desa/kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku rencana kerja pembangunan desa/kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku rencana pembangunan jangka menengah desa	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku kader pemberdayaan masyarakat	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku kegiatan pembangunan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku inventaris proyek	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Loket pelayanan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Kotak Pengaduan Masyarakat	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Papan informasi pelayanan	Ada/ <del>tidak</del> Terisi/ <del>tidak</del>
Laporan kinerja tahunan	Ada/ <del>tidak</del>
Laporan akhir jabatan/memori jabatan lurah/desa	Ada/ <del>tidak</del>
<b>PRASARANA DAN SARANA BPD</b>	
Gedung Kantor	Ada/ <del>tidak</del>
Ruangan Kerja	Ada/ <del>tidak</del> -Kondisi : baik/ <del>rusak</del>
Listrik	Ada/ <del>tidak</del>
Air bersih	Ada/ <del>tidak</del>

Telepon	Ada/tidak
<b>INVENTARIS DAN ALAT TULIS KANTOR BPD</b>	
Jumlah mesin tik	.....1..... buah
Jumlah meja	.....2..... buah
Jumlah kursi	.....1..... buah
Jumlah almari arsip	.....1..... buah
Komputer	.....-..... buah
Mesin fax	.....-..... buah
<b>ADMINISTRASI BPD</b>	
Buku-buku administrasi keanggotaan BPD	<del>Ada/tidak</del> Terisi/tidak
Buku agenda BPD	.....jenis- Terisi/tidak
Buku data kegiatan BPD	<del>Ada/tidak</del> Terisi/tidak
Buku Sekretariat BPD	<del>Ada/tidak</del> Terisi/tidak
Buku Data Keputusan BPD	<del>Ada/tidak</del> Terisi/tidak
<b>PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN</b>	
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	<del>Ada/Tidak</del> - Kondisi baik/rusak
Alat tulis kantor	Aktif/ <del>tidak</del>
Barang inventaris	3 Jenis
Buku administrasi	3 Jenis
Jenis kegiatan	5 Jenis
Jumlah pengurus	11. orang
Jumlah ruang kerja	1 Ruang
Balai Dusun/Lingkungan/sejenisnya	<del>Ada/Tidak</del> - Kondisi baik/rusak
Listrik	Ada/ <del>tidak</del>
Air bersih	Ada/ <del>tidak</del>
Telepon	Ada/ <del>tidak</del>
<b>INVENTARIS DAN ALAT TULIS KANTOR</b>	
Jumlah mesin tik	1 Buah
Jumlah meja	10 Buah
Jumlah kursi	75 Buah
Jumlah almari arsip	3 Buah
Komputer	2 Buah
Mesin fax	1 Buah
Jumlah mesin kompute/lektop	2 Buah

<b>JENIS PEMBINAAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN</b>	
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	Ada/ <del>tidak</del>
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan	Ada/ <del>tidak</del>
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Ada/ <del>tidak</del>
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan serta BPD	Ada/ <del>tidak</del>
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing	Ada/ <del>tidak</del>
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	3 kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	3 kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	0 kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	2 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	3 kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kali
<b>PEMBINAAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAHNA DESA DAN KELURAHAN</b>	
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	Ada/ <del>tidak</del>
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	Ada/ <del>tidak</del>
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Ada/ <del>tidak</del>
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi	0 kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD	2 jenis

Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	0 jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	Ada/tidak-0 jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	Ada/tidak-0 jenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat	Ada/tidak-0 jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	Ada/tidak-0 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	Ada/tidak-0 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	Ada/tidak-0 jenis
<b>PEMBINAAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN</b>	
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa	Ada/tidak-0 jenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	Ada/tidak-0 jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa	Ada/tidak-0 jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	Ada/tidak-1 jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	Ada/tidak-1 jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	Ada/tidak-1 jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa	Ada/tidak-1 jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Ada/tidak-1 jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	Ada/tidak-1 jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan	Ada/tidak-1 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	Ada/tidak-1 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan	Ada/tidak-1 jenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat	Ada/tidak-1 jenis

Desa/Kelurahan dan BPD	
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	Ada/ <del>tidak</del> -0 jenis
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT KEPADA DESA / KELURAHAN</b>	
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi	Ada/ <del>tidak</del> -1 jenis

anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	Ada/ <del>tidak</del> 1 jenis
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	Ada/ <del>tidak</del> 1 jenis

